

**PENGARUH *GOOD GOVERNANCE* DAN KOMPETENSI
PERANGKAT DESA TERHADAP EFEKTIVITAS
PENGELOLAAN DANA DESA
(STUDI KASUS KABUPATEN WONOSOBO)**

Skripsi

Untuk memenuhi sebagai persyaratan

Mencapai Drajat Sarjana S1

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh:

Muhamad Nasrul Fuad

Nim : 31401900005

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2022**

**PENGARUH *GOOD GOVERNANCE* DAN KOMPETENSI
PERANGKAT DESA TERHADAP EFEKTIVITAS
PENGELOLAAN DANA DESA
(STUDI KASUS KABUPATEN WONOSOBO)**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana S1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung



Disusun Oleh

Muhamad Nasrul Fuad

Nim : 31401900005

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
SEMARANG**

2022

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
PENGARUH *GOOD GOVERNANCE* DAN KOMPETENSI
PERANGKAT DESA TERHADAP EFEKTIVITAS
PENGELOLAAN DANA DESA
(STUDI KASUS KABUPATEN WONOSOBO)

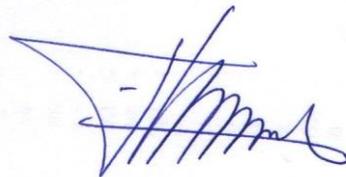
Disusun Oleh:

Muhamad Nasrul Fuad

Nim: 31401900023

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian penelitian Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 02 September 2022
Pembimbing,



Dr. Chrisna Suhendi, SE., MBA., Ak., Ca
NIK. 21049303

HALAMAN PERSETUJUAN

PENGARUH *GOOD GOVERNANCE* DAN KOMPETENSI PERANGKAT
DESA TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA
(STUDI KASUS KABUPATEN WONOSOBO)

Disusun Oleh:

Muhamad Nasrul Fuad

Nim: 31401900023

Telah dipertahankan di depan penguji

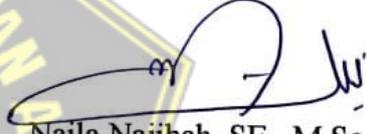
Pada tanggal, 30 September 2022

Susunan Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II


Dr. Dra. Hj. Winarsih, SE., M.Si., CSRS., CRSA
NIK. 211415029


Naila Najihah, SE., M.Sc
NIK. 21148029

Pembimbing


Dr. Chrisna Suhendi, SE., MBA., Ak., Ca
NIK. 21049303

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Pada Tanggal, 30 September 2022

Ketua Program Studi Akuntansi


Dr. Dra. Hj. Winarsih, SE., M.Si., CSRS., CRSA
NIK. 211415029

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Muhamad Nasrul Fuad
NIM : 31401900005
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : S1 Akuntansi
Universitas : Universitas Islam Sultan Agung

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa usulan penelitian skripsi berjudul **“Pengaruh *Good Governance* dan Kompetensi Perangkat Desa Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Kabupaten Wonosobo)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain. Pendapat orang lain yang terdapat dalam usulan penelitian skripsi ini dikutip berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiasi dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 07 Maret 2023
Yang Menyatakan,



Muhamad Nasrul Fuad
NIM. 31401900005

DAFTAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhamad Nasrul Fuad

NIM : 31401900005

Program Studi : S1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Alamat : Cengang Rt 12 Rw 07, Sedayu, Sapuran, Wonosobo

Email : nasrulfuad370@gmail.com

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir /Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul : **“Pengaruh *Good Governance* dan Kompetensi Perangkat Desa terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Kabupaten Wonosobo)”** dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 07 Maret 2023

Yang Menyatakan,



Muhamad Nasrul Fuad

31401900005

*coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

"Pendidikan yang berkualitas memberi kita kemampuan untuk memerangi kebodohan dan kemiskinan."

- Charles B. Rangel

Skripsi ini Kupersembahkan untuk:

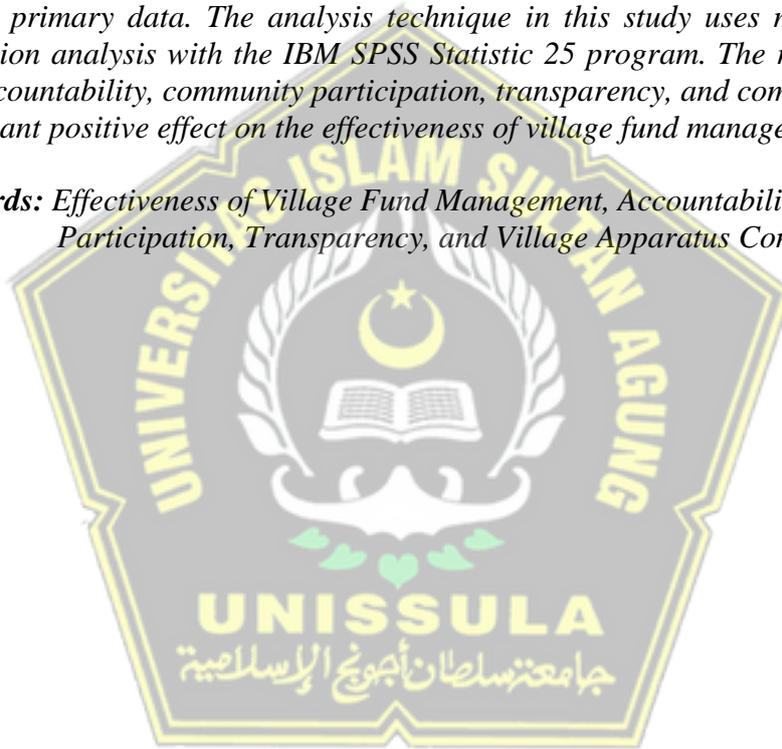
- Allah SWT
- Ayah dan Ibu yang tercinta
- Keluarga yang tercinta
- Sahabat dan Teman-temanku yang teryang



ABSTRACT

The effectiveness of village fund management is an achievement of government work programs in accordance with predetermined targets by comparing output to results. The management of village funds in Indonesia is still not fully effective, the Indonesia Corruption Watch (ICW) states that village funds are the sector most corrupted because they have increased from year to year. This study aims to determine the factors that can affect the effectiveness of village fund management, including accountability, community participation, transparency, and competence of village officials. The type of research used by researchers is quantitative research with a descriptive approach method. The population in this study were villages from Sapuran District and Wonosobo District in Wonosobo Regency. The sampling method in this study used a saturated sampling technique which resulted in 92 respondents or village officials. Processed data is primary data. The analysis technique in this study uses multiple linear regression analysis with the IBM SPSS Statistic 25 program. The results showed that accountability, community participation, transparency, and competence had a significant positive effect on the effectiveness of village fund management.

Keywords: *Effectiveness of Village Fund Management, Accountability, Community Participation, Transparency, and Village Apparatus Competence.*



ABSTRAK

Efektivitas pengelolaan dana desa adalah sebuah pencapaian atas program kerja pemerintahan sesuai dengan target yang sudah ditentukan dengan membandingkan antara keluaran terhadap hasil. Pengelolaan dana desa di Indonesia masih belum sepenuhnya efektif, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan bahwa dana desa menjadi sektor yang paling banyak dikorupsi sebab dari tahun ketahun mengalami kenaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa antara lain akuntabilitas, partisipasi masyarakat, transparansi, dan kompetensi perangkat desa. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kuantitatif dengan metode pendekatan deskriptif. Populasi pada penelitian ini adalah desa yang berasal dari Kecamatan Sapuran dan Kecamatan Wonosobo di Kabupaten Wonosobo. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh yang menghasilkan 92 responden atau perangkat desa. Data yang diolah merupakan data primer. Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan perangkat program IBM SPSS Statistic 25. Hasil penelitian memperoleh bahwa akuntabilitas, partisipasi masyarakat, transparansi, dan kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.

Katak Kunci: *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Transparansi, dan Kompetensi perangkat desa.*



INTISARI

Pengelolaan dana desa yang efektivitas memiliki tujuan agar dalam merealisasikan anggaran guna mewujudkan program pemerintah dalam pembangunan negara yang dapat menunjang perekonomian masyarakat terutama yang berada di desa. Untuk itu dalam pengelolaan dana desa *good governance* sangat penting untuk direalisasikan. Dalam *good governance* terdapat beberapa prinsip dasar diantaranya Transparansi berarti adanya kebebasan publik untuk mengakses informasi yang berhubungan dengan kepentingan publik akan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi atau keikutsertaan di dalamnya. Akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban, menyajikan, dan melaporkan sesuatu dari seseorang kepada pemberi pertanggung jawaban. Partisipasi masyarakat mencerminkan keikutsertaan masyarakat dalam pertimbangan pengambilan keputusan melalui lembaga yang menerima aspirasi dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan dasar kebebasan dalam mengutarakan pendapatnya. Aspek lain yang juga penting dalam pengelolaan dana desa adalah kompetensi perangkat desa dimana dengan adanya kompetensi yang tinggi masyarakat akan menerima pelayanan yang terbaik.

Beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa (Ramadhani and Yuliati, 2021; Putra and Rasmini, 2019; Alpendra, 2020), kemudian beberapa peneliti partisipasi masyarakat juga dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa (Ramadhani and Yuliati, 2021; Putra and Rasmini, 2019). Selain itu, beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa (Putra and Rasmini, 2019; Ramadhani and Yuliati, 2021).

pada penelitian efektivitas pengelolaan dana desa, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kompetensi perangkat desa berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa (Rasmini and Mimba, 2021; Hindrayani and Wati, 2021).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan peneliti, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana pengaruh akuntabilitas, partisipasi masyarakat, transparansi, dan kompetensi perangkat desa terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh akuntabilitas, partisipasi masyarakat, transparansi, dan kompetensi perangkat desa terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan tinjauan pustaka pada penelitian ini, menghasilkan empat hipotesis di antara: akuntabilitas berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa, partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana Desa, transparansi berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana Desa, kompetensi berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana Desa.

Pada penelitian ini, populasinya adalah perangkat desa dari kecamatan Sapuran dan kecamatan Wonosobo. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh (sensus). Terdapat 92 sampel yang sudah memenuhi kriteria penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sedangkan dalam pengujian data menggunakan metode analisis regresi linier berganda yang diolah menggunakan program SPSS.

Berdasarkan hasil uji penelitian diperoleh bahwa semua hipotesis dapat diterima. Pada uji simultan dapat diketahui bahwa akuntabilitas, partisipasi

masyarakat, transparansi, dan kompetensi perangkat desa secara bersama-sama berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. hasil tersebut juga sama dengan uji parsial dimana secara parsial akuntabilitas, partisipasi masyarakat, transparansi, dan kompetensi perangkat desa secara bersama-sama berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, petunjuk, hidayah, serta karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan penelitian skripsi dengan judul **“Pengaruh *Good Governance* dan Kompetensi Perangkat Desa Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Kabupaten Wonosobo)”**.

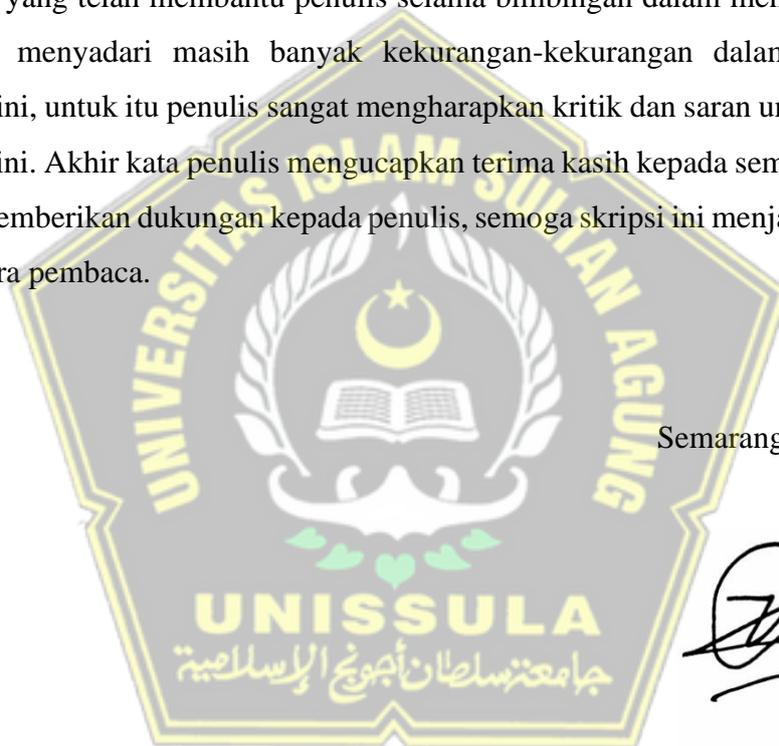
Tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan program studi Sarjana S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Pada Kesempatan kali, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih atas bimbingan, bantuan, dukungan, semangat dan doa, baik yang diucapkan secara langsung maupun tidak langsung kepada :

1. Prof. Dr. H. Heru Sulisty, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Provita Wijayanti, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Chrisna Suhendi, SE., MBA., Ak., Ca selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta saran dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Kedua orang tua yang teryang, Bapak Mugo Haryono dan Ibu Tuter yang senantiasa mendoakan, membimbing, dan mendukung baik dalam segi moral maupun materiil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Kakak-kakaku yang selalu memberikan doa dan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
6. Seluruh teman teman akuntansi khususnya excellent class yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mendidik, memberikan ilmu pengetahuan dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan.

8. Seluruh Staf Karyawan dan Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu penulis dalam proses keperluan pendaftaran administrasi.
9. Seluruh Perangkat Desa di Kecamatan Wonosobo dan Kecamatan Sapuran yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Untuk semua pihak yang tidak bisa sebutkan oleh penulis satu persatu yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan karunia-Nya dan membalas kebaikan mereka yang telah membantu penulis selama bimbingan dalam menyusun skripsi. Penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada penulis, semoga skripsi ini menjadi bermanfaat bagi para pembaca.



Semarang, 27 Mei 2022

Penulis

Muhamad Nasrul Fuad

NIM 31401900005

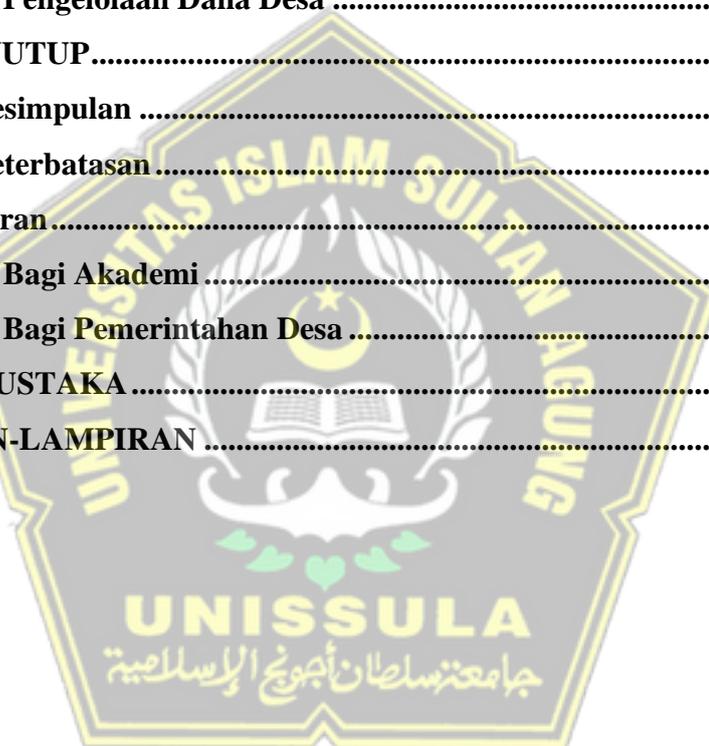
DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
DAFTAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRACT	viii
ABSTRAK	ix
INTISARI	x
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	10
1.3 Pertanyaan Penelitian	11
1.4 Tujuan Penelitian	11
1.5 Manfaat	12
1.1 Manfaat Teoritis	12
1.2 Manfaat Praktis	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Teori Keagenan (Agency Theory).....	13
2.2 Efektivitas Pengelolaan Dana Desa.....	16
2.3 Tata Kelola yang baik (Good Governance) Desa	17
2.3.1 Akuntabilitas	18
2.3.2 Partisipasi Masyarakat.....	20
2.3.3 Transparansi	21

2.4	Kompetensi perangkat Desa	23
2.5	Peneliti Terdahulu	24
2.6	Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis	33
2.6.1	Kerangka Pemikiran Teoritis	33
2.6.2	Pengembangan Hipotesis	34
2.6.2.1	Pengaruh akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana desa	35
2.6.2.2	Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan dana desa	36
2.6.2.3	Pengaruh transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana desa	37
2.6.2.4	Pengaruh Kompetensi Perangkat desa terhadap efektivitas pengelolaan dana desa	39
BAB III METODE PENELITIAN		41
3.1	Jenis Penelitian	41
3.2	Populasi dan Sampel	41
3.2.1	Populasi.....	41
3.2.2	Sampel.....	42
3.3	Jenis dan Sumber Data	42
3.4	Metode Pengumpulan data.....	43
3.5	Definisi Operasional dan pengukuran variabel.....	43
3.5.1	Variabel Dependen (Y).....	44
3.5.2	Variabel Independen (X).....	44
3.5.3	Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel	44
3.6	Teknik Analisis	49
3.6.1	Statistik Deskriptif.....	50
3.6.2	Uji Kualitas Data	50
3.6.2.1	Uji Validitas.....	50
3.6.2.2	Uji Reliabilitas.....	52
3.6.3	Uji Asumsi Klasik	52
3.6.3.1	Uji Normalitas.....	52
3.6.3.2	Uji Multikolonieritas	53

3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas.....	53
3.7 Analisis Regresi Linier Berganda	54
3.8 Uji Kelayakan Model	55
3.8.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji statistik F).....	55
3.8.2 Koefisien Determinasi $r - Square$ atau (R^2)	55
3.8.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t).....	56
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	59
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	59
4.1.1 Distribusi Penyebaran Kuesioner.....	59
4.1.2 Karakteristik Sampel atau Responden.....	60
4.2 Analisis Data	63
4.2.1 Hasil Analisis Deskriptif Variabel.....	63
4.2.2 Tingkat Capaian Responden (TCR)	65
4.2.2.1 Tingkat Capaian Responden Variabel Akuntabilitas (X1) ...	65
4.2.2.2 Tingkat Capaian Responden Variabel Partisipasi Masyarakat(X2).....	67
4.2.2.3 Tingkat Capaian Responden Variabel Transparansi (X3) ..	68
4.2.2.4 Tingkat Capaian Responden Variabel Kompetensi Perangkat Desa(X4).....	69
4.2.2.5 Tingkat Capaian Responden Variabel Efektivitas Pengelolaan Dana Desa(Y).....	70
4.3 Hasil Uji Kualitas Data	72
4.3.1 Hasil Uji Validitas.....	72
4.3.2 Hasil Uji Realibilitas.....	74
4.4 Hasil Uji Asumsi Klasik	75
4.4.1 Hasil Uji Normalitas	75
4.4.2 Hasil Uji Multikolinieritas	76
4.4.3 Hasil Uji Heteroskedasitas	76
4.5 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	77
4.6 Uji Kelayakan Model	79
4.6.1 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	79
4.6.2 Hasil Uji Koefisien Determinasi(R^2).....	80

4.6.3	Hasil Uji Parsial (Uji T).....	81
4.7	Pembahasan Penelitian	83
4.7.1	Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa	83
4.7.2	Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa	85
4.7.3	Pengaruh Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa	86
4.7.4	Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa	88
BAB V PENUTUP		90
5.1	Kesimpulan	90
5.2	Keterbatasan	91
5.3	Saran.....	91
5.3.1	Bagi Akademi	91
5.3.2	Bagi Pemerintahan Desa	92
DAFTAR PUSTAKA		93
LAMPIRAN-LAMPIRAN		99



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel 3. 1 Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel.....	44
Tabel 4. 1 Distribusi Sampel Penelitian	60
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden.....	60
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden berdasarkan Umur.....	61
Tabel 4. 4 Karakteristik Responden berdasarkan Jenjang Pendidikan terakhir.....	61
Tabel 4. 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan.....	62
Tabel 4. 6 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Masa Kerja	63
Tabel 4. 7 Deskriptif variabel.....	64
Tabel 4. 8 Tingkat Capaian Responden Variabel Akuntabilitas.....	65
Tabel 4. 9 Tingkat Capaian Responden Variabel Partisipasi Masyarakat(X2).....	67
Tabel 4. 10 Tingkat Capaian Responden Variabel Transparansi(X3).....	68
Tabel 4. 11 Tingkat Capaian Responden Variabel Kompetensi Perangkat Desa(X4)	69
Tabel 4. 12 Tingkat Capaian Responden Variabel Efektivitas Pengelolaan Dana Desa(Y)	70
Tabel 4. 13 Hasil Uji Validitas	72
Tabel 4. 14 Hasil Uji Realibilitas	74
Tabel 4. 15 Hasil Uji Normalitas.....	75
Tabel 4. 16 Hasil Uji Multikolinieritas.....	76
Tabel 4. 17 Hasil Uji Heteroskedasitas.....	77
Tabel 4. 18 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	78
Tabel 4. 19 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	80
Tabel 4. 20 Hasil Uji Koefisien Determinasi	81
Tabel 4. 21 Hasil Uji Parsial (Uji T)	81

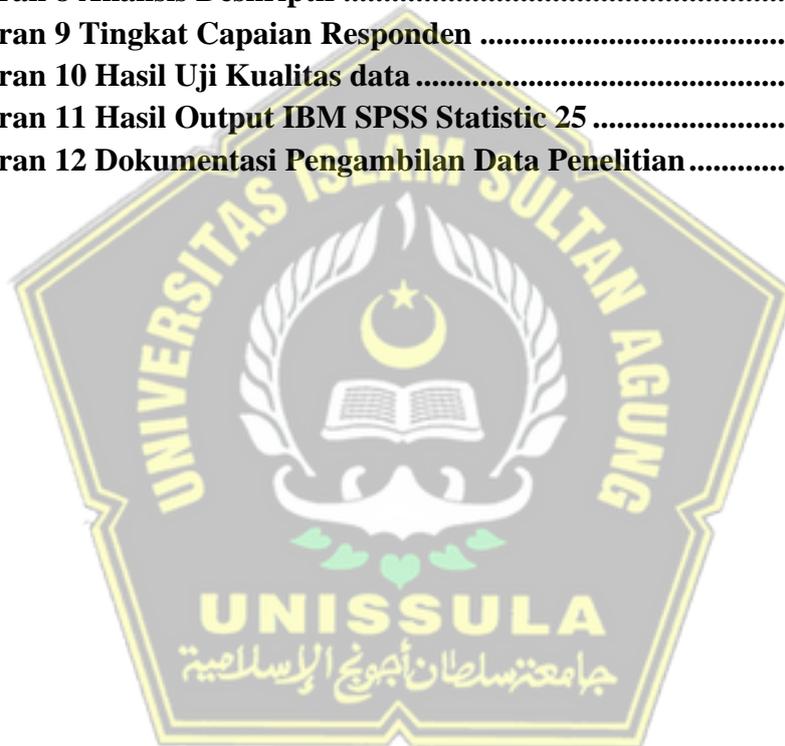
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Teoritis..... 34



DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Penyebaran Kuesioner Kepada Kecamatan Wonosobo.....	100
Lampiran 2 Surat Permohonan Izin Penyebaran Kuesioner Kepada Kecamatan Sapuran	101
Lampiran 3 Surat Izin Penyebaran Kuesioner dari Kecamatan Wonosobo	102
Lampiran 4 Surat izin Penyebaran Kuesioner dari Kecamatan Sapuran ..	103
Lampiran 5 Tanda izin Pengambilan Data Penelitian	104
Lampiran 6 Kuesioner Penelitian.....	107
Lampiran 7 Tabulasi	115
Lampiran 8 Analisis Deskriptif	125
Lampiran 9 Tingkat Capaian Responden	125
Lampiran 10 Hasil Uji Kualitas data	127
Lampiran 11 Hasil Output IBM SPSS Statistic 25	135
Lampiran 12 Dokumentasi Pengambilan Data Penelitian.....	139



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Desa adalah kesatuan individu yang menempati sebuah area pemukiman dengan wewenang untuk menata dan menjaga urusan kepentingan pemerintah maupun kepentingan masyarakat yang ada didalamnya dengan menganut gagasan ide, usulan masyarakat, dan hak konservatif yang diakui dan dijunjung pada sistem pemerintahan desa di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan sekaligus bertanggung jawab atas terwujudnya pembangunan desa dan pemberdayaan elemen masyarakat guna mensejahterakan seluruh lapisan yang ada didalamnya. Kemandirian desa dalam penyelenggaran pembangunan pemerintah desa untuk memenuhi seluruh aspek kebutuhannya tanpa mengandalkan uluran tangan dari pihak diluar lingkupnya sehingga desa mampu memaksimalkan potensi yang didalamnya termasuk aset, keuangan, dan pendapatan yang dimiliki desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa (Tim Bersama, 2006).

Upaya yang dilakukan dalam peningkatan pembangunan desa dengan adanya pembaruan sistem salah satunya adalah dengan alokasi dana desa (ADD) yang diterima dari kabupaten/kota langsung berasal langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendongkrak perekonomian di pedesaan agar dapat mengatasi berbagai permasalahan ekonomi pada desa tersebut

serta untuk memberdayakan seluruh lingkup masyarakat yang memiliki peranan penting dalam pembangunan desa. Keseriusan pemerintah dalam pembangunan desa dapat terlihat dari beberapa langkah konkret salah satunya pengalokasian dana desa yang dari tahun ketahun jumlahnya meningkat yang diberikan ke seluruh wilayah perdesaan di Indonesia (Malumperas, Manossoh, and Pangerapan 2021). Dana desa merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk desa melalui transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pembiayaan penyelenggaraan program pemerintah dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat (Astika, Yuliani, and Andri 2022).

Dari awal Alokasi dana desa mulai tahun 2015 sampai tahun 2021, pemerintah telah mengucurkan anggaran untuk dana desa sudah mencapai 400 Triliun. Besaran nilai alokasi dana desa tersebut dari tahun 2015 sampai tahun 2021 selalu mengalami kenaikan, hal tersebut sebagai bukti bahwa adanya keseriusan dari pemerintah untuk melaksanakan kebijakan alokasi dana desa di Indonesia. Pada tahun 2015 pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar 20,8 Triliun, kemudian besaran nilai dana desa naik 124,8% di tahun 2016 atau sebesar 46,7 Triliun, kenaikan Kembali di tahun 2017 sebesar 28% atau alokasi dana desa sebesar 59,8 Triliun di tahun tersebut, di tahun 2018 dan 2019 besaran alokasi dana desa meningkat menjadi 59,9 Triliun dan 69,8 Triliun, kenaikan alokasi dana desa masih berlanjut di tahun 2020 nilai alokasi dana desa sebesar 71,2 Triliun dan di tahun 2021 alokasi dana desa sebesar 72 Triliun (Kemenkeu, 2021). Dilain sisi, banyaknya besaran dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah, dimana setiap

tahunnya mengalami kenaikan yang signifikan akan ada muncul sebuah pertanyaan bahwa apakah pengelolaan dana desa di suatu wilayah dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan secara mandiri. Hal ini tentu adanya tuntutan bagi seluruh aparatur desa dalam mengelola dana desa harus sangat diperhatikan, terutama permasalahan pada tata kelola pemerintahan (*good governance*).

Good governance dapat diartikan dengan tata kelola pemerintah yang menggunakan prinsip-prinsip dasar yang dapat mencerminkan pemerintahan yang mengikuti peraturan yang berlaku (Haryanto, Salmuddin, and Arifuddin 2007). Dalam *good governance* terdapat beberapa prinsip dasar diantaranya partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas (Mardiasmo, 2009). Transparansi berarti adanya kebebasan publik untuk mengakses informasi yang berhubungan dengan kepentingan publik akan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi atau keikutsertaan di dalamnya. Akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban, menyajikan, dan melaporkan sesuatu dari seseorang kepada pemberi pertanggungjawaban. Partisipasi masyarakat mencerminkan keikutsertaan masyarakat dalam pertimbangan pengambilan keputusan melalui lembaga yang menerima aspirasi dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan dasar kebebasan dalam mengutarakan pendapatnya. Dengan adanya prinsip dasar tersebut, diharapkan agar munculnya kebijakan publik yang baru dapat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat agar tindakan kecurangan dapat dicegah dan memanipulasi data dengan tujuan hanya menguntungkan seseorang atau kelompok tertentu. Menurut Santiso (2001) *good governance* merupakan sebuah

penyelenggaraan kegiatan pembangunan negara yang dapat sejalan dengan kaidah-kaidah pemerintahan untuk menghindari pengelolaan dana pemerintah yang kurang efektif serta efisien. Terwujudnya *good governance* yang baik perlunya peran pemeriksaan keuangan dan lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi alokasi dana tersebut. Terlebih dalam masa sekarang masyarakat desa merasa bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah desa yang cenderung hanya menguntungkan bagi pihak tertentu dan mengabaikan kritikan dari masyarakat yang mana kebijakan tersebut dikeluarkan secara mendadak dan mendapatkan respon dari masyarakat yang kurang baik sehingga kebijakan tersebut tentunya akan diprotes oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan kurangnya prinsip transparansi pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan yang akan mengakibatkan kesenjangan antara pemerintah desa dengan masyarakat. Adanya kesenjangan antara masyarakat dan pemerintah akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap tingkat kinerja aparatur negara. Untuk membangun sebuah kepercayaan dari masyarakat diperlukan akuntansi pemerintah dalam pengelolaan dana desa guna menciptakan *good governance* yang baik (Kisnawati, Astini, and Oktaviani 2018).

Pengelolaan dana yang efektivitas harus mempertimbangkan beberapa aspek penting, (a) pencapaian tujuan, dimana pengelolaan dana desa yang efektif jika penggunaannya sesuai dengan kebutuhan yang mencerminkan bahwa tujuan dari pengalokasian tercapai. (b) Keakuratan waktu, dalam proses transfer dan pengalokasian dana desa harus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dari pelaksanaan program kerja hingga program kerja tersebut berakhir. (c) kesesuaian

manfaat, sebagai penerima program masyarakat dapat merasakan pemanfaatan dari dana desa. Dan (d) hasil dari pengelolaan dana desa harus dapat sesuai dengan harapan dari masyarakat (Putra dan Rasmini, 2019). Menurut Mardiasmo (2004) menyatakan bahwa adanya tujuan yang spesifik akan mengarahkan sesuatu yang produktif. Sehingga akan mendorong seseorang agar melakukan tindakan terbaiknya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut dapat kita implikasi dalam sebuah pemerintahan, dimana ketika sebuah pemerintahan telah mempunyai tujuan yang jelas maka akan mendorong para pegawainya untuk mencapai tujuan tersebut.

Pengelolaan dana desa yang efektifitas memiliki tujuan agar dalam merealisasikan anggaran guna mewujudkan program pemerintah dalam pembangunan negara yang dapat menunjang perekonomian masyarakat terutama yang berada di desa. Kenaikan anggaran dana desa dari tahun ke tahun, seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Namun, fakta yang ada di lapangan memperlihatkan bahwa pengalokasian dana desa tidak sepenuhnya digunakan untuk melaksanakan program pemerintahan, akan tetapi terdapat banyak penyelewengan anggaran desa oleh perangkat desa untuk kepentingan pribadinya. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan bahwa dana desa menjadi sektor yang paling banyak dikorupsi sebab dari tahun ketahun mengalami kenaikan. Pada 2019, terdapat 46 kasus tindakan korupsi yang melibatkan 46 tersangka yang tersebar di Indonesia menyebabkan kerugian negara mencapai Rp. 32,3 Miliar. Kemudian ditahun berikutnya pada tahun 2020 tingkat penyelewengan dana desa di Indonesia mengalami kenaikan dimana terdapat 129 kasus korupsi dana desa

yang merugikan negara sebesar 50,1 Miliar. Selama kurun waktu 7 tahun dana desa dialokasikan, di tahun 2021 kasus tindakan penyelewengan dana desa menjadi tertinggi dibanding tahun sebelumnya karena terdapat 154 kasus yang melibatkan 245 perangkat desa serta merugikan negara sejumlah 233 Miliar (dialeksis.com, 2022). Kabupaten wonosobo menjadi wilayah dengan tindakan korupsi kedua untuk anggaran dana desa tahun 2020 setelah kabupaten Kebumen. Pada tahun tersebut, terjadi tindak penyelewengan dana desa yang dilakukan kepala desa Wadasmalang, Kebumen sebesar Rp. 224 juta (Tvonenews.com, 2022). Sedangkan pada kabupaten Wonosobo tepatnya di desa Tanjunganom telah terjadi tindak penyelewengan dana desa sebesar Rp. 200 juta oleh kepala desa (Tvone 2021a). Kabupaten Wonosobo adalah salah satu kabupaten di wilayah Jawa Tengah dengan luas wilayahnya 981,41 Km² yang terdiri dari 15 Kecamatan, 236 desa, dan 29 kelurahan. Dalam pengelolaan dana desa, Kabupaten Wonosobo belum sepenuhnya mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebab kurangnya kompetensi dan pengetahuan perangkat desa yang mengakibatkan kondisi dimana pengelolaan dana desa belum efektif sehingga mendorong perangkat desa untuk melakukan tindakan penyelewengan dana desa karena mereka kurang memahami peraturan dan prosedur pemerintahan desa yang berlaku (Sukmawidewi and Nugraha 2021). Di kabupaten Wonosobo Jawa tengah telah terjadi tindakan penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh beberapa perangkat desa diantaranya di Desa Karangrejo Kecamatan Selomerto, Desa Ngadimulyo Kecamatan Selomerto, Desa Tempursari Kecamatan Sapuran, dan Desah Tanjunganom Kecamatan Kaliwiro. Pada Tahun 2015, kepala desa Tanjung Anom yang berada di kecamatan kaliwiro ditetapkan

sebagai tersangka dalam kasus penyelewengan dana desa pada program rumah tidak layak huni (RTLH) yang ditaksir merugikan negara mencapai Rp. 120 Juta (jpp.com, 2015). Dua tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2017 terjadi korupsi dana desa yang menyeret kepala desa Karangrejo Kecamatan Selomerto yang menggelapkan dana untuk modal BUMDes dan Fasilitas kegiatan pemuda dan Olahraga sebesar Rp. 67 Juta (krjogja.com, 2017). kemudian pada 2019, penyelewengan dana desa pada program rumah tidak layak huni (RTLH) kembali terjadi di Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, namun tersangkanya berbeda yaitu kepala desa Tempursari Kecamatan Sapuran yang menyelewengkan dana desa sebesar Rp. 38,5 Juta (suaramerdeka.com, 2019). Pada tahun 2021, Penyelewengan dana desa terjadi kembali di Kecamatan Selomerto, korupsi tersebut dilakukan oleh kepala desa Ngadimulyo yang menyelewengkan dana desa untuk tahun 2020 melalui program pembangunan senderan merugikan negara sebesar 200 juta (Tvone, 2021).

Tingginya tindakan penyelewengan dana desa mencerminkan bahwa rendahnya tata kelola (*good governance*) dalam sebuah pemerintahan desa (ombudsman, 2022). Untuk itu, pada penelitian ini mencoba untuk menjelaskan faktor penentu yang dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan desa adalah akuntabilitas atau kewajiban pemegang kekuasaan agar dapat mengungkapkan, menyajikan, melaporkan dan pertanggungjawaban seluruh aktivitas dalam menjalankan program pemerintah untuk dipertanggungjawabkan kepada pihak yang memberikan kekuasaan (Mahsun 2013). Pada penelitian sebelumnya yang

menerangkan bahwa faktor akuntabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dan desa (Ramadhani and Yuliati, 2021; Putra and Rasmini, 2019; Alpendra, 2020). Namun, terdapat penelitian sebelumnya yang menerangkan bahwa akuntabilitas tidak memiliki pengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa (Yanto and Aqfir 2021).

Adanya keterbukaan informasi serta kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi yang memadai dan akurat terkait informasi publik merupakan arti dari transparansi (Mardiasmo, 2018). Transparansi merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong masyarakat publik untuk memberikan aspirasinya terkait informasi mengenai perencanaan publik, pelaksanaan publik, hingga pertanggungjawaban publik yang dilakukan oleh pemerintahan desa dalam mengelola dana desa. Selain itu, adanya transparansi akan mempermudah masyarakat publik untuk mengawasi pengelolaan dana desa agar terhindar dari tindak korupsi perangkat desa. Dalam penelitian (Ramadhani and Yuliati, 2021; Putra and Rasmini, 2019) menerangkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Hal tersebut berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Yanto and Aqfir 2021).

Menurut Peraturan kementerian Desa, partisipasi masyarakat merupakan komponen yang paling penting dalam pengelolaan dana desa untuk mencapai pembangunan yang partisipatif (PDDT 2020). Dalam penyelenggaraan pemerintahan dibutuhkan elemen masyarakat yang berperan sebagai faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa untuk mengevaluasi seluruh program pemerintah agar

penyelewengan kekuasaan dapat dihindarkan sehingga pembangunan dan pengembangan desa dapat dilakukan secara efektif. Pernyataan kementerian desa ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Putra and Rasmini, 2019; Ramadhani and Yuliati, 2021) bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Akan tetapi berbeda dengan hasil penelitian yang menerangkan bahwa partisipasi masyarakat tidak memiliki pengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa (Yanto and Aqfir, 2021; Nazar *et al.*, 2021).

Kompetensi merupakan keahlian yang dimiliki oleh individu dalam menggunakan ilmu pengetahuan serta keterampilan dalam sebuah pekerjaan yang bertanggung jawab (Hannon, Paul D., Patton, Dean and Marlow 2000). Pernyataan tersebut jika kita implikasikan dengan pemerintahan desa maka dapat kita ketahui bahwa kompetensi sangat diperlukan dalam diri seorang perangkat desa agar dapat berkontribusi optimal dalam pembangunan desa dengan mewujudkan seluruh visi dan misi serta tujuan dari pemerintah desa dengan mengelola dana desa sebaik mungkin. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rasmini and Mimba, 2021; Hindrayani and Wati, 2021) yang menyatakan bahwa kompetensi perangkat desa memiliki pengaruh positif terhadap Efektivitas pengelolaan dana desa. Namun, penelitian tersebut berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa kompetensi perangkat desa tidak memiliki pengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa (Sweetenia *et al.* 2019).

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan, terdapat beberapa penelitian yang sudah dilakukan dulu memperoleh hasil penelitian yang berbeda-

beda atau tidak konsisten sehingga menarik peneliti untuk melakukan penelitian kembali terkait pengaruh akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan kompetensi terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan mengacu pada penelitian Putra and Rasmini (2019). Terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sampel yang digunakan, dimana penelitian Putra and Rasmini (2019) pengambilan sampel di Kabupaten Badung, Bali Sedangkan penelitian ini mengambil sampel di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Kemudian peneliti juga menambahkan variabel independen yaitu kompetensi sebab perangkat desa yang memiliki kompetensi dapat mengoptimalkan penggunaan dana desa untuk dapat merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan sehingga efektivitas dalam pengelolaan dana desa dapat terwujud dan mencegah tindakan korupsi yang dilakukan perangkat desa (Rasmini and Mimba, 2021).

1.2 Perumusan Masalah

Adanya fenomena dan *research gap* mengenai efektivitas pengelolaan dana desa yang telah di kemukakan diatas, ditemukan beberapa permasalahan yaitu adanya tindak penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh perangkat desa. dengan adanya konsep efektivitas pengelolaan dana desa diharapkan mampu mendorong perangkat desa untuk mewujudkan tujuan alokasi dana desa yaitu untuk mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, permasalahan pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Bagaimana pengaruh akuntabilitas, partisipasi masyarakat, transparansi, dan kompetensi perangkat desa terhadap efektivitas pengelolaan dana desa”.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah transparansi berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa?
4. Apakah kompetensi perangkat desa berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian yang dilakukan bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana desa
2. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan dana desa
3. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana desa
4. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi perangkat desa terhadap efektivitas pengelolaan dana desa

1.5 Manfaat

1.5.1 Manfaat Teoritis

Bagi akademis, diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sebagai wacana dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di akuntansi sektor publik.

1.5.2 Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam memberikan masukan bagi pemangku kepentingan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori Keagenan merupakan sebuah teori yang melibatkan hubungan kedua pihak antara *principal* dan *agent* dimana *principal* sebagai pihak yang melimpahkan kekuasaan serta memberikan kebebasan kepada pihak *agent* untuk melakukan pengambilan keputusan dengan menggunakan nama *principal* (Jensen and Meckling 1976). Menurut Eisenhardt (1989) yang melandasi teori keagenan adalah tiga asumsi diantaranya asumsi mengenai sifat manusia, asumsi mengenai keorganisasian, dan asumsi mengenai informasi. Asumsi mengenai sifat manusia adalah asumsi yang menekankan bahwa setiap individu tentunya memiliki sifat untuk mementingkan dirinya sendiri dibanding orang lain (*self interest*), manusia juga memiliki keterbatasan dalam menentukan tindakan yang tepat (*bounded rationality*), dan individu lebih menyukai untuk menghindari resiko (*risk aversion*). Asumsi mengenai keorganisasian adalah asumsi yang berasal dari konflik antar anggota dalam organisasi, produktivitas harus memenuhi kriteria efisiensi, dan adanya kesenjangan informasi antara *principal* dan *agent*. Asumsi mengenai informasi adalah asumsi yang memandang bahwa informasi merupakan sesuatu yang diperjual belikan.

Dalam teori keagenan, pihak *principal* dan pihak *agent* mempunyai tujuan dan kepentingan masing-masing sehingga akan muncul konflik kepentingan atau konflik keagenan antara pihak *principal* dengan pihak *agent*. Adanya konflik tersebut, akan mengakibatkan munculnya biaya keagenan berupa biaya *monitoring*

expenditure cost (principal), *bonding expenditure cost (agent)*, dan *residual loss cost* (Jensen and Meckling 1976). *monitoring expenditure cost* adalah biaya yang dikeluarkan *principal* untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perilaku *agent*. *bonding expenditure cost (agent)* adalah biaya yang dikeluarkan *agent* untuk memberikan jaminan kepada *principal* terkait dengan tindakan dan pengambilan keputusan tertentu yang dilakukan oleh *agent* tidak akan memberikan kerugian kepada *principal* atau biaya yang dikeluarkan *agent* untuk memberikan kompensasi terhadap *principal* jika *agent* melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan *principal*. *residual loss cost* adalah biaya yang dikeluarkan karena adanya penurunan tingkat kemakmuran dari *principal* dan *agent* yang dikarenakan setelah adanya perbedaan pengambilan keputusan oleh *principal* terhadap keputusan yang diambil oleh *agent* (*agency relationship*).

Organisasi Sektor publik terutama pada pemerintahan desa terdapat adanya hubungan serta masalah keagenan. Keterkaitan antara *agency* teori dengan pemerintahan desa dapat kita lihat pada saat pelaporan keuangan oleh pemerintah desa dimana perangkat desa sebagai pihak *agent* yang mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk mengelola dana desa dan menyajikan seluruh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa kepada pihak *principal* atau masyarakat (Marlon dan Lodovicus, 2021). Kepala Desa merupakan seorang pemimpin yang dipilih berdasarkan suara rakyat dan berkewajiban untuk memenuhi kepentingan yang berhubungan dengan rakyat (UU No 32 tentang Pemerintahan Daerah, 2004). Adanya pendelegasian kekuasaan dan wewenang antara masyarakat (*agent*) kepada kepala desa (*principal*) akan memunculkan asimetri informasi atau konflik

kepentingan yang berdampak kepada masyarakat yang sebagai pihak *principal* tidak memperoleh informasi yang menyeluruh terkait efektivitas pengelolaan dana desa. Asimetri informasi dapat memicu tindakan penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh perangkat desa.

Akuntabilitas merupakan sebuah kewajiban pihak *agent* atau pemegang amanah dalam hal ini adalah perangkat desa untuk menyajikan serta mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan dana desa kepada pihak *principal* atau pemberi amanah dalam hal ini adalah masyarakat yang memerlukan seluruh pertanggungjawaban dari pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat memberikan masyarakat sebagai pihak *principal* untuk dapat terlibat dalam pengambilan kebijakan yang diambil oleh perangkat desa yang sebagai pihak *agent* agar dana desa dapat teralokasi tepat sasaran. Adanya transparansi artinya memberikan kebebasan pihak *principal* atau masyarakat untuk mengakses semua informasi pertanggungjawaban perangkat desa atau *pihak agent* dalam mengelola dana desa sehingga dapat menghindari terjadinya asimetri informasi antara perangkat desa dengan masyarakat. Dengan adanya kompetensi perangkat desa mampu memberikan kepercayaan pihak *principal* atau masyarakat untuk melimpahkan semua kekuasaan dan kewenangan kepada pihak *agent* atau perangkat desa.

Berdasarkan teori keagenan pengelolaan dana desa harus perlu diawasi agar para perangkat desa dapat mencapai efektivitas pengelolaan dana desa. Dengan meningkatkan *good governance* serta keahlian perangkat desa dalam pengelolaan dana desa, akan menyebabkan perangkat desa menyajikan informasi pengelolaan

dana desa secara lengkap sesuai peraturan yang berlaku. Sehingga asimetri informasi dapat berkurang yang menyebabkan perangkat desa untuk melakukan tindakan penyelewengan dana desa atau tindak korupsi akan menjadi kecil atau sedikit.

2.2 Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 Dana desa adalah dana yang dimiliki sebuah desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang kemudian ditransfer pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota/Kabupaten dapat digunakan desa untuk membiayai segala kebutuhan desa seperti untuk menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, serta memberdayakan masyarakat desa. Dana desa merupakan kewajiban dan hak yang dilimpahkan kepada pemerintah desa untuk dikelola dengan baik agar dapat mencapai pembangunan yang dapat menajjahterakan masyarakat desa. Untuk itu, dalam pengelolaan dana desa diperlukan konsep efektivitas didalamnya.

Konsep efektivitas adalah sebuah pernyataan yang menjelaskan mengenai seberapa jauh pencapaian dari tujuan yang telah ditentukan atau sebuah kegiatan yang dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan(Santoso, 2011:29). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006, pengelolaan yang efektif adalah sebuah pencapaian atas program kerja pemerintahan sesuai dengan target yang sudah ditentukan dengan membandingkan antara keluaran terhadap hasil. Sehingga efektivitas pengelolaan keuangan dapat

diketahui melalui perbandingan antara realisasi anggaran belanja terhadap target belanja yang telah ditentukan (Santoso, 2011:29). Pendekatan yang digunakan untuk menilai efektivitas terdapat dua pendekatan yaitu pendekatan tujuan dan pendekatan teori sistem (Gibson 1985). Pendekatan tujuan dalam mengukur dan merumuskan efektivitas dapat menggunakan pencapaian atas tujuan yang telah ditentukan terhadap usaha yang dilakukan para pemangku kepentingan dalam merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan pendekatan teori sistem dalam mengukur dan merumuskan efektivitas lebih menekankan adaptasi para pemangku kepentingan terhadap tuntutan yang diterima dari pihak eksternal.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan teori sistem dalam pengukuran efektivitas pengelolaan dana desa. Pada pendekatan ini berdasarkan suatu anggapan bahwa organisasi atau pemerintahan desa merupakan sebuah sistem. Dalam suatu sistem pemerintah desa terdapat hubungan antara para perangkat desa yang mempunyai kewajiban untuk mengelola dana desa yang meliputi segala aktivitas dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan desa dengan berlandaskan tujuan negara yaitu untuk mensejahterakan dan memberdayakan seluruh masyarakat.

2.3 Tata Kelola yang baik (*Good Governance*) Desa

Tata kelola yang baik adalah sebuah konsep yang memiliki orientasi pembangunan pada sektor publik terhadap pemerintahan kearah yang lebih baik(Mardiasmo, 2009). Konsep tata kelola yang baik (*good governance*) sangat diperlukan dalam suatu pemerintahan karena dapat menghasilkan pemerintahan

yang bersih, sehingga pemerintahan yang ada di Indonesia memiliki kewajiban untuk menerapkan tata kelola yang baik (*good governance*) sebab telah ditetapkan standar internasional (Sutedi, 2011). Penerapan tata kelola yang baik (*good governance*) khususnya pada pemerintahan desa dapat dilakukan dengan memasukan kedalam sistem pada pengelolaan dana desa agar dapat memberikan manfaat kepada seluruh pihak yang memiliki kepentingan kepada pemerintah. Tolak ukur dalam penerapan tata kelola yang baik (*good governance*) dalam suatu pemerintahan dapat dilihat dari merealisasikan seluruh prinsip-prinsip utama yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat (Mardiasmo, 2009).

2.3.1 Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah sebuah kekuasaan yang dimiliki pihak agent untuk melakukan pengelolaan sumber daya, pengungkapan, dan pelaporan segala kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan sumber daya kepada pihak yang memberikan kekuasaan (*Principial*). Akuntabilitas merupakan kegiatan yang menyajikan dan mempertanggungjawabkan seluruh informasi atas kegiatan serta kinerja pemerintahan kepada seluruh pihak yang memiliki kepentingan didalamnya (Mahmudi 2016).

Akuntabilitas adalah kewajiban organisasi sektor publik untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan mengenai kinerja yang dalam organisasi tersebut kepada para pengguna atau pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh informasi pertanggungjawaban (Waluyo, 2007). Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban para pihak *Agent* agar dapat memberikan informasi mengenai seluruh kegiatan mulai dari pertanggungjawaban, penyajian, dan

pelaporan serta pengungkapan atas tanggung jawab yang diterima pihak *agent* kepada pihak *principal* yang tentunya memiliki kewenangan untuk memperoleh informasi yang disediakan pihak *agent* (Mardiasmo, 2009).

Dari beberapa penjelasan mengenai akuntabilitas diatas, maka akuntabilitas dapat disimpulkan sebagai kinerja pemerintahan desa mulai dari melakukan perencanaan program kerja hingga mengawasi jalannya program kerja tersebut yang menggunakan realisasi anggaran dana desa harus dapat dimintai pertanggungjawabannya. Pemerintah desa harus memberikan pertanggungjawaban dan melaporkan seluruh kegiatan yang telah direncanakan secara rutin kepada masyarakat dan jajaran pemerintahan yang ada diatasnya sesuai undang-undang yang berlaku umum. Dengan adanya prinsip akuntabilitas diharapkan pemerintahan desa mampu menjadi pemerintahan yang dapat mencerminkan transparan kepada masyarakat serta tidak berorientasikan pada kepentingan pribadi. Terdapat beberapa indikator atas pencapaian keberhasilan dari prinsip akuntabilitas (Putra and Rasmini, 2019) antara lain :

- a. Integritas Keuangan, dengan adanya integritas dalam pengelolaan dana desa diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan secara jujur atau sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan yang dapat merugikan pengguna laporan keuangan
- b. Pengungkapan, dengan adanya pengungkapan yang dilakukan oleh perangkat desa bertujuan agar laporan keuangan yang disajikan secara lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
- c. Kepatuhan terhadap standar yang berlaku dan peraturan perundangan-undangan oleh perangkat desa dalam melakukan pengelolaan dana desa.

2.3.2 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah bentuk dari suatu harapan agar demokrasi ditingkatkan melalui pemerintahan yang desentralisasi dimana masyarakat berperan aktif dalam seluruh proses kegiatan yang diadakan pemerintah mulai dari perencanaan dari bawah (*button up*) hingga pelaksanaan pembangunan masyarakat (H.A.R Tilar, 2009). Partisipasi memiliki arti sebagai peran dari seseorang atau kelompok masyarakat terhadap proses pembangunan yang dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan pernyataan maupun aktivitas yang dapat memberikan saran berupa tenaga, waktu, pikiran, modal, keahlian, dan ikut serta dalam pemanfaatan dari pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah (Sumaryadi, 2005:46).

Menurut Mardiasmo (2009:18) Partisipasi adalah suatu kondisi dimana masyarakat terlibat secara nyata ikut serta dalam pengambilan suatu kebijakan secara langsung atau tidak langsung dengan berlandaskan kebebasan berpendapat dan berasosiasi serta dapat berpartisipasi konstruktif. Dari beberapa penjelasan mengenai transparansi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan sebuah wujud dari keikutsertaan masyarakat untuk dapat terlibat dalam pengelolaan keuangan desa dimulai dari kegiatan perencanaan hingga pelaksanaan serta evaluasi agar dapat mencapai efektivitas pengelolaan dana desa dan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat direalisasikan dengan menghadiri rapat yang diadakan pemerintahan desa, mengutarakan pendapatan yang berupa pemikiran atau gagasan ide, dapat aktif dalam diskusi serta memberikan tanggapan atas program kerja yang ditawarkan pemerintah desa tanpa

dasar paksaan sehingga masyarakat diberikan kebebasan dalam setiap proses pemerintahan. Menurut Solekhan (2014) untuk mencapai keberhasilan dari partisipasi masyarakat terdapat indikator antara lain:

- a. Dalam sebuah desa harus ada kelompok-kelompok yang menampung seluruh aspirasi masyarakat
- b. Adanya keahlian atau kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam berpartisipasi dalam seluruh proses kegiatan pemerintah
- c. Terdapat kebebasan masyarakat mengutarakan pendapatnya ketika proses pengambilan kebijakan atau keputusan pemerintah.

2.3.3 Transparansi

Transparansi adalah sebuah prinsip yang memberikan kebebasan kepada masyarakat publik untuk memperoleh atau mengakses informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah atau organisasi mencakup perencanaan kebijakan sampai pelaksanaan kebijakan serta hasil yang diperoleh dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah (Krina, 2003). Menurut Mardiasmo (2004) Transparansi memiliki arti keterbukaan atau keterusterangan sebuah organisasi dalam menyediakan atau memberikan informasi yang berhubungan dengan seluruh kegiatan pengelolaan sumber daya yang dimiliki terhadap semua pihak yang memiliki kepentingan dengan informasi tersebut.

Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 13 tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa transparansi adalah prinsip yang harus dipatuhi pemerintah agar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan memberikan kebebasan

masyarakat untuk mengetahui informasi yang seluas-luasnya terkait pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya transparansi diharapkan agar dapat memberikan jaminan bagi masyarakat publik mengakses informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah. Salah satu penyelenggaraan pemerintah di desa adalah tahap perencanaan program kerja dan penganggaran dana yang diperlukan harus mengikutsertakan masyarakat melalui Badan Permusyawarah Desa (BPD) agar nantinya program kerja yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan kemampuan desa.

Dari beberapa penjelasan mengenai transparansi di atas, maka transparansi dapat disimpulkan sebuah prinsip keterbukaan pemerintah dengan memberikan kebebasan terhadap masyarakat publik untuk memperoleh dan mengakses informasi yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa, sehingga masyarakat dapat mengawasi kinerja pemerintahan desa dalam merealisasikan seluruh anggaran yang dimiliki desa agar terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Untuk indikator pencapaian keberhasilan dari prinsip transparansi (Kristianten, 2006) antara lain :

- a. Adanya informasi yang lengkap dan memadai terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa
- b. Dalam pengelolaan keuangan desa melalui musyawarah yang mengikutsertakan masyarakat
- c. Adanya keterbukaan terkait proses pengelolaan keuangan desa
- d. Pemerintah desa menyediakan informasi mengenai dokumen yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa.

2.4 Kompetensi perangkat Desa

Kompetensi adalah kemampuan dan kapasitas yang dimiliki seseorang dalam menjalankan pekerjaannya sehingga orang tersebut dapat mewujudkan tujuan yang telah ditentukan organisasi atau perusahaan (Hutapea dan Thoha, 2008). Menurut Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) nomor 46A tanggal 23 November 2003 menyatakan bahwa kompetensi adalah sebuah keahlian dan karakter yang harus dimiliki setiap pegawai negeri sipil yang dapat berupa keterampilan, pengetahuan, dan sikap perilaku dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya atas jabatan yang dimiliki, sehingga diharapkan kinerja dari para pegawai negeri sipil dapat dilakukan secara profesional, efisien, dan efektif.

Menurut Spencer dalam buku Moehariono (2018) kompetensi adalah keterampilan yang membedakan individu dengan individu lain menjadi elemen dasar dalam mencapai efektivitas kinerja individu dengan bertolak ukur terhadap standar yang digunakan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan Menurut (Roe, 2001) kompetensi adalah keahlian yang dimiliki setiap individu dalam melaksanakan tugas dengan mengintegrasikan keterampilan, pengetahuan, dan perilaku yang diperoleh dari pembelajaran yang pernah diterima dan pengalaman yang telah dialami setiap individu.

Dari beberapa penjelasan mengenai kompetensi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi menjadi syarat utama yang harus dimiliki individu terutama para perangkat desa yang memiliki kewenangan untuk mengelola dana desa. Dengan adanya keahlian yang dimiliki masing-masing individu dapat

meningkatkan kinerja perangkat desa dalam pengelolaan dana desa dapat mencapai tingkat efektivitas pengelolaan dana desa agar tujuan utama dari alokasi dana desa dapat terwujud yang dapat terlihat dengan adanya pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan desa sehingga dengan efektivitas pengelolaan dana desa dapat mencerminkan masyarakat yang sejahtera, makmur, dan adil. Untuk mengukur kompetensi perangkat desa dapat menggunakan indikator (Nurkhasanah, 2019) antara lain :

- a. Perangkat desa memiliki kompetensi pemahaman mengenai pengelolaan keuangan desa.
- b. Perangkat desa mampu melaksanakan kewajibannya dalam menjalankan tugas utamanya dalam menyajikan laporan keuangan desa.
- c. Perangkat desa mengikuti pelatihan teknis untuk meningkatkan keahlian dalam mengelola dana desa dan menyajikan laporan keuangan desa.
- d. Perangkat desa mempunyai inisiatif untuk melakukan pekerjaan lainnya yang ada pada pemerintah desa.
- e. Perangkat desa selalu mengedepankan sikapnya berdasarkan kode etik pegawai pemerintah desa.

2.5 Peneliti Terdahulu

Penelitian terkait pengaruh akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan kompetensi perangkat desa terhadap efektivitas pengelolaan dana desa telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu antara lain:

Tabel 2. 1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Variabel	Metode	Hasil Peneliti
1	I Made Yoga Darma Putra, Ni Ketut Rasmini (2019)	-Independen : Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat -Dependen : Efektivitas Pengelolaan Dana Desa	-Sampel : 396 perangkat desa -Metode : Regresi Linier Berganda	Akuntabilitas berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana desa. Transparansi berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana desa

No	Peneliti (Tahun)	Variabel	Metode	Hasil Peneliti
2	Ni Luh Putu Hindrayani Ni Wayan Alit Erlina Wati (2021)	-Independen : KOMPETENSI, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI -Dependen : Efektivitas Pengelolaan Dana Desa	-Sampel : 144 perangkat Desa di Kintamani -Metode : Pengujian Validitasnya, Analisa statistik deskriptif, Pengujian Reliabilitasnya, Pengujian Asumsi Klasik	Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa . Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa . Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap

No	Peneliti (Tahun)	Variabel	Metode	Hasil Peneliti
				efektivitas pengelolaan dana desa .
3	Ridwan Indra Hermawan, Yulita Zanaria, Nedi Hendri (2021)	-Independen : Akuntabilitas, Tranparansi dan Partispasi masyarakat -Dependen : Efektivitas Pengelolaan Dana Desa	-Sampel : 97 responden -Metode : analisis pengujian instrumen, asumsi klasik dan hipotesis	akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa
4	Fitri Sukmawat,	-Independen :	-Sampel :	Transparansi tidak

No	Peneliti (Tahun)	Variabel	Metode	Hasil Peneliti
	Alfi Nurfitriani (2019)	Transparansi, akuntabilitas -Dependen : Efektivitas Pengelolaan Dana Desa	60 Perangkat Desa -Metode : validitas, reliabilitas, uji normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas, koefisien determinasi, uji t dan uji F	berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Transparansi dan akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.
5	Ni Ketut Rasmini, Putu Sri	-Independen : kompetensi aparat, gaya kepemimpi-	-Sampel : 133 Perangkat desa	kompetensi aparatur, gaya kepemimpinan,

No	Peneliti (Tahun)	Variabel	Metode	Hasil Peneliti
	Harta Mimba (2021)	nan, budaya Tri Hita Karana dan partisipasi masyarakat.- Dependen : Efektivitas Pengelolaan Dana Desa	-Metode : Metode untuk menentukan sampel adalah proportional stratified random sampling dan pengumpulan data menggunakan kuesioner. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda.	dan partisipasi ma-syarakat berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Sementara itu budaya Tri Hita Karana tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.
6	I Gusti Ayu Purnamawati, Ni Ketut Sari	-Independen : Peran Komitmen, Kompetensi, dan Spiritualitas	-Sampel : 168 Perangkat desa -Metode :	Peran Komitmen, Kompetensi, dan

No	Peneliti (Tahun)	Variabel	Metode	Hasil Peneliti
	Adnyani (2019)	-Dependen : Efektivitas Pengelolaan Dana Desa	Model analisis yang digunakan yaitu multiple regression	Spiritualitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa
7	Khusnatul Zulfa Wafirotin, Umi Septiviasuti (2019)	-Independen : <i>transparency, Community Participation, and Accountability</i> -Dependen : <i>Village Fund management</i>	-Sampel : <i>144 questionnaires</i> -Metode : <i>Descriptive Statistics, Validity Test, Reliability Test, Multiple Linear Regression Analysis, Determination Coefficient Test, Partial Test, and Simultaneous Test</i>	<i>all independent variables simultaneously have a positive and significant effect on Village Fund management</i>
8	Nada Salsabila	-Independen :	-Sampel : 72 responden	akuntabilitas berpengaruh

No	Peneliti (Tahun)	Variabel	Metode	Hasil Peneliti
	Ramadhani, Anik Yuliati (2021)	Akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarkat -Dependen : Efektivitas Pengelolaan Dana Desa	-Metode : Partial Least Square (PLS) dengan software WarpPLS 7.0.	positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa, transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa, Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa
9	Edi Yanto, Aqfir (2020)	-Independen :Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas	-Sampel : 50 perangkat desa -Metode :	tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara

No	Peneliti (Tahun)	Variabel	Metode	Hasil Peneliti
		-Dependen : Efektivitas Pengelolaan Dana Desa	Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda	Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.
10	Anam Masruhin, M. Elfan Kaukab (2019)	-Independen : kompetensi aparatur, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat, dan kejelasan sasaran anggaran -Dependen : Efektivitas Pengelolaan Dana Desa	-Sampel : 80 responden. -Metode : Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda	kompetensi aparatur, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat, dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.

2.6 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

2.6.1 Kerangka Pemikiran Teoritis

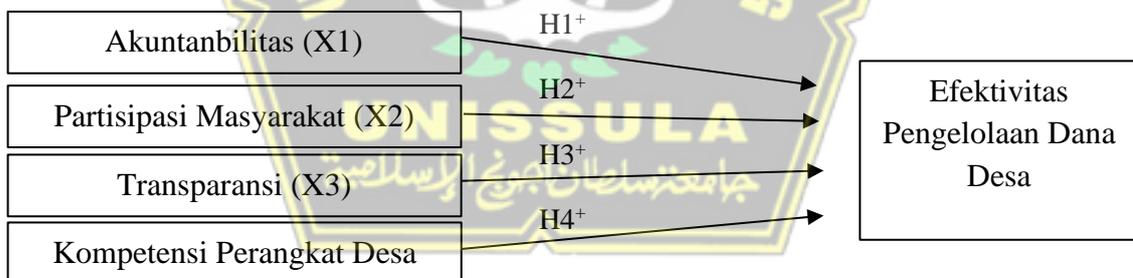
Kerangka berpikir adalah sebuah model konseptual mengenai hubungan antara teori dengan berbagai fenomena atau permasalahan yang perlu untuk diselesaikan sehingga menghasilkan variabel-variabel yang diperoleh dari teori yang sudah dideskripsikan. Dari teori yang sudah dideskripsikan, kemudian dianalisis secara sistematis untuk menghasilkan hasil penelitian mengenai hubungan antar variabel yang akan diteliti sehingga dapat melakukan perumusan hipotesis (Sugiono, 2016).

Penelitian ini berdasarkan teori keagenan (*Agency theory*). Dalam teori keagenan (*Agency Theory*) menjelaskan mengenai adanya hubungan antara pemerintahan desa (*Agent*) yang memperoleh amanah untuk menjalankan pemerintahan dari masyarakat (*principal*). Salah satu kekuasaan yang dilimpahkan masyarakat kepada pemerintah adalah untuk mengelola dana desa yang dialokasikan untuk pembangunan dan pemberdayaan desa. Untuk mencapai tujuan utama dari alokasi anggaran dana desa adalah dapat mensejahterakan seluruh elemen masyarakat, maka diperlukan pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien. Efektivitas pengelolaan dana desa dipengaruhi beberapa faktor antara lain *good governance* (akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi) dan kompetensi perangkat desa (Putri, 2021).

Good governance atau tata kelola yang baik adalah hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa sebab

perangkat desa dalam mengolah dana desa secara akuntabel, menyajikan informasi terkait penggunaan dana desa secara transparansi, dan pemerintah desa juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan program pembangunan dan pemberdayaan desa. Kemudian yang diperhatikan dalam pengelolaan dana desa adalah kompetensi dari setiap perangkat desa. Kompetensi merupakan keahlian atau keterampilan yang harus dimiliki perangkat desa untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan dana desa sehingga dapat mendorong pembangunan dan pemberdayaan desa yang optimal. Dengan adanya *good governance* dan kompetensi perangkat desa diharapkan agar dapat mewujudkan efektivitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan kerangka pemikiran yang teoritis sebagai berikut:



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran Teoritis

2.6.2 Pengembangan Hipotesis

Menurut Nanang Martono (2010:57) Hipotesis adalah dugaan sementara atau kesimpulan sementara atas penelitian yang akan dilakukan dengan mencari kebenarannya melalui pengujian secara teoritis yang didapat dari tinjauan pustaka penelitian. Pada penelitian ini, hipotesis yang akan diajukan mempunyai tujuan untuk mencari suatu kebenaran dengan menguji pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi

masyarakat, transparansi, dan kompetensi terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan teori dan uraian diatas, maka hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut:

2.6.2.1 Pengaruh akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana desa

Akuntabilitas adalah suatu prinsip yang berhubungan dengan pemberian kekuasaan terkait seluruh kinerja dan kegiatan yang dilaksanakan oleh entitas terhadap pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Akuntabilitas berarti seluruh kegiatan yang dilaksanakan perlu dipertanggungjawabkan terhadap publik. Ketika seluruh informasi yang disajikan oleh perangkat desa mampu dipertanggungjawabkan dan dapat mencerminkan kondisi yang sesungguhnya pemerintahan desa kepada masyarakat yang sebagai pemberi wewenang sehingga dalam mengelola dana desa secara efektif.

Keterkaitan *agency theory* dengan variabel akuntabilitas dimana akuntabilitas publik merupakan pertanggungjawaban yang menjadi kewajiban bagi pemerintah desa yang menjadi pihak yang menerima tanggung jawab (*agent*) untuk melakukan penyajian, pengungkapan, dan pelaporan seluruh kegiatan dan program desa kepada masyarakat yang sebagai pihak pemberi tanggung jawab (*principal*) yang miliki hak tersebut (Kisnawati et al. 2018).

Pada penelitian yang pernah dilakukan oleh Ramadhani and Yuliati (2021) menyebutkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap efektivitas penggunaan dana desa. Kemudian Putra dan Rasmini (2019) juga melakukan pengujian terkait pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan dana dana desa. Hasil peneltian tersebut

menyatakan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Hal tersebut semakin menjelaskan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa diperlukan prinsip akuntabilitas, sehingga pada penelitian ini hipotesis yang diajukan adalah akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.

H1: akuntabilitas berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana Desa.

2.6.2.2 Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan dana desa

Partisipasi Masyarakat adalah peran masyarakat dengan menyampaikan pendapatnya mengenai tahap pengambilan keputusan. Masyarakat atau kelompok tertentu diberikan kebebasan dalam menyampaikan ide dan gagasan secara langsung atau melalui lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi dan kepentingan masing-masing. Partisipasi masyarakat berarti bahwa setiap individu diberikan kesempatan untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama pada pengambilan keputusan baik secara langsung oleh individu maupun tidak langsung dengan diwakilkan oleh lembaga perwakilan. Pada organisasi publik masyarakat atau kelompok memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam seluruh rangkaian kegiatan pembangunan dan pemberdayaan dengan memberikan saran, pemikiran, waktu, tenaga, dan materi serta masyarakat juga harus dapat menikmati dan memanfaatkan seluruh hasil dari pembangunan tersebut sehingga mampu terwujudnya efektivitas dalam pengelolaan dana desa.

Partisipasi masyarakat berkaitan dengan agency theory, mengingat masyarakat yang merupakan pihak principal harus dilibatkan dalam pengambilan

kebijakan yang dikeluarkan oleh perangkat desa (agent), agar ketika penggunaan anggaran dana desa tidak dialokasi sebagai mestinya, masyarakat dapat secara langsung komplain dan memberikan saran agar pengelolaan dana desa dapat efektif sehingga tujuan dari alokasi dana desa dapat terwujud dengan kesejahteraan seluruh masyarakat desa.

Pada penelitian yang pernah dilakukan oleh Putra dan Rasmini (2019) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Indra Hermawan, Zanaria dan Hendri (2021) yang juga menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis bahwa terdapat pengaruh positif antara partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.

H2: Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa

2.6.2.3 Pengaruh transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana desa

Transparansi adalah sebuah prinsip yang memberikan kebebasan atau menjamin kemudahan mengakses informasi kepada seluruh masyarakat mengenai penyelenggaraan organisasi atau pemerintah terkait informasi tentang tahapan perencanaan hingga pelaksanaan program kerja serta hasil yang diperoleh dari program tersebut. Upaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa harus terbuka atas informasi yang mudah diakses masyarakat mulai tahap penyusunan perencanaan pembangunan yang dapat dilakukan melalui

musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) antara pemerintah desa dengan masyarakat hingga pelaksanaannya dan pemerintah juga menyajikan penggunaan anggaran dana desa secara jelas dan detail sehingga adanya keterbukaan mampu mendorong perangkat desa tidak melakukan tindak penyelewengan dana desa agar terwujudnya efektivitas pengelolaan dana desa.

Dalam *agency theory* dijelaskan bahwa dalam hubungan masyarakat (*agent*) kepada kepala desa (*principal*) akan memunculkan asimetri informasi, dimana masyarakat sebagai pihak *principal* tidak mendapatkan informasi yang sama dengan perangkat desa sebagai pihak *agent*, sehingga dengan transparansi pemerintah desa mengenai pengelolaan keuangan desa dan perencanaan pembangunan maka akan terhindar dari asimetri informasi tersebut serta dalam mewujudkan efektivitas pengelolaan dana desa akan semakin mudah.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Rasmini (2019) pada penelitian pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat pada efektivitas pengelolaan dana desa yang menghasilkan kesimpulan bahwa transparansi memiliki pengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Kemudian pada penelitian yang dilakukan Wafirotin dan Septiastuti (2019) juga menyimpulkan bahwa transparansi memiliki pengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan penjelasan diatas, maka pada penelitian ini peneliti merumuskan hipotesis bahwa transparansi memiliki pengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.

H3: Transparansi berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa

2.6.2.4 Pengaruh Kompetensi Perangkat desa terhadap efektivitas pengelolaan dana desa

Kompetensi adalah keahlian yang dimiliki setiap individu dalam melakukan segala aktivitas yang mencakup keterampilan, tindakan, dan pengetahuan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kompetensi perangkat desa merupakan sebuah keahlian yang harus dimiliki setiap perangkat desa dalam mengelola keuangan desa dengan merealisasikan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat mendorong terwujudnya pembangunan desa yang baik. Perangkat desa yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya akan mempermudah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa. Perangkat desa memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat desa sehingga adanya kompetensi yang memadai akan berdampak pada pelayanan yang diberikan tentunya sesuai dengan sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan *agency theory* adanya perangkat desa (*agent*) yang mempunyai kompetensi akan menambah tingkat kepercayaan dari pemerintah pusat dan masyarakat (*principal*) untuk melimpahkan wewenang dan kekuasaan untuk mengelola dana desa sehingga mampu terlaksana dengan efektif dan efisien. Adanya kompetensi perangkat desa yang tinggi akan meningkatkan efektivitas pengelolaan desa dan mempermudah dalam mensejahterakan masyarakat desa.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Masruhin and Kaukab (2019) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara kompetensi perangkat desa terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wafirotin and Septiviastuti (2019) yang juga menyatakan

bahwa kompetensi memiliki pengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan pernyataan diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis bahwa terdapat pengaruh positif antara kompetensi perangkat desa terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.

H4 : kompetensi perangkat desa berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kuantitatif dengan metode pendekatan deskriptif. Penelitian kuantitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang menjelaskan atau mendeskripsikan serta menganalisis secara lengkap mengenai hubungan antara akuntabilitas, partisipasi masyarakat, transparansi, dan kompetensi perangkat desa terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di kecamatan Sapuran dan kecamatan wonosobo yang kabupaten Wonosobo dengan menggunakan analisis statistik.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut Sugiono (2018) populasi adalah wilayah atau ranah generalisasi yang mencakup atas obyek serta subyek yang memiliki karakteristik dan kualitas yang sudah ditetapkan oleh peneliti untuk dapat ditarik kesimpulannya. Pada penelitian ini, populasinya adalah perangkat desa dari kecamatan Sapuran dengan jumlah 16 desa dan kecamatan wonosobo dengan jumlah 7 desa akan menjadi obyek yang akan diteliti sebab letak kedua tempat tersebut berbeda dimana kecamatan wonosobo terletak di kota sedangkan kecamatan Sapuran terletak di pedesaan sehingga mampu mendeskripsikan kabupaten wonosobo. Menurut Andang Wardoyo (Wonosobozone, 2022) bahwa di kabupaten Wonosobo masih banyak ditemukan tindak penyelewengan dana desa dikarenakan rendahnya

rendahnya tingkat kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki, sehingga akan berdampak pada terhambatnya pelaksanaan program pembangunan desa dan kurangnya efektivitas pengelolaan dana desa.

3.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian atau elemen yang berasal dari karakteristik dan jumlah sebuah populasi (Sugiono, 2018). Pada penelitian ini, teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh(sensus). Teknik sampling jenuh adalah teknik yang menjadikan seluruh anggota populasi dijadikan sampel pada penelitian yang akan dilakukan (Sugiono, 2018). Sehingga sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh perangkat desa di Kecamatan Sapuran dan Kecamatan wonosobo yang terdiri dari kepala desa (Kades), sekretaris desa(sekdes), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan kaur keuangan atau bendahara desa yang sejumlah 92 responden dari 23 desa. Pemilihan perangkat desa tersebut dikarenakan adanya keterlibatan pihak tersebut dalam pengelolaan keuangan desa.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan data primer. Artinya bahwa dalam memperoleh data penelitian dengan melakukan penyebaran kuesioner secara langsung kepada para reponden. Pada penelitian ini, data yang akan digunakan berasal dari hasil tanggapan atas kuesioner yang telah disebarkan kepada seluruh perangkat desa di kecamatan Sapuran dan Kecamatan Wonosobo.

3.4 Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data pada riset ini menggunakan metode pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data penelitian yang dapat dilakukan dengan memberikan sejumlah pernyataan tertulis maupun pertanyaan kepada para responden yang telah ditentukan untuk memberikan tanggapannya (Sugiyono, 2019). Kemudian kuesioner tersebut disebar keseluruhan desa di kecamatan Sapuran dan Kecamatan Wonosobo untuk diberikan kepada sejumlah 92 perangkat desa. Pada kuesioner yang digunakan pada penelitian ini, pengukuran terhadap persepsi, sikap, dan opini individu atau kelompok dilakukan dengan menggunakan skala likert scale yang terdiri dari 5 nilai atau skor pada jawaban yang dipilih dalam kuesioner sebagai berikut:

Sangat Tidak setuju (STS)	: 1
Tidak Setuju (TS)	: 2
Netral (N)	: 3
Setuju (S)	: 4
Sangat setuju (SS)	: 5

3.5 Definisi Operasional dan pengukuran variabel

Pada penelitian variabel yang digunakan adalah variabel independen dan variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu efektivitas pengelolaan dana desa sedangkan variabel independennya adalah akuntabilitas, partisipasi masyarakat, transparansi, dan kompetensi perangkat desa.

3.5.1 Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen (variabel terikat) adalah variabel penelitian yang dapat dipengaruhi atau terpengaruh dikarenakan adanya variabel independen (variabel bebas). Pada penelitian ini variabel dependennya adalah efektivitas pengelolaan dana desa.

3.5.2 Variabel Independen (X)

Variabel Independen (variabel bebas) merupakan variabel penelitian yang dapat memberikan pengaruh atau variabel yang mengakibatkan perubahan pada variabel dependen (variabel terikat). Pada penelitian ini variabel independennya adalah akuntabilitas, partisipasi masyarakat, transparansi, dan kompetensi perangkat desa.

3.5.3 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

Tabel 3. 1
Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Efektivitas pengelolaan dana desa (Y)	adalah sebuah pencapaian atas program kerja pemerintahan sesuai dengan target yang sudah ditentukan dengan membandingkan antara keluaran	<ul style="list-style-type: none"> • pencapaian tujuan pengalokasian dana desa • Keakuratan waktu, dalam proses transfer dan pengalokasian dana 	Likert

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
	terhadap hasil (Permendagri, 2006)	<ul style="list-style-type: none"> • kesesuaian pemanfaatan dari dana desa, • kesesuaian hasil dari pengelolaan dana desa dengan harapan masyarakat. • Ketepatan waktu dalam pelaporan pengelolaan dana desa. (Putra and Rasmini, 2019) 	
Akuntabilitas (X1)	Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan informasi mengenai seluruh kegiatan mulai dari pertanggungjawaban, penyajian, dan pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> • Integritas • Pengungkapan • Kepatuhan (Putra and Rasmini, 2019) 	Likert

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
	berdasarkan standar yang berlaku umum (Mardiasmo, 2009)		
Partisipasi Masyarakat (X2)	adalah suatu kondisi dimana masyarakat terlibat secara nyata ikut serta dalam pengambilan suatu kebijakan secara langsung atau tidak langsung dengan berlandaskan kebebasan berpendapat dan berasosiasi serta dapat berpartisipasi konstruktif (Mardiasmo,2009:18)	<ul style="list-style-type: none"> • Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pengelolaan dana desa • Keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan alokasi dana desa • Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi, melaporkan dan evaluasi pelaksanaan anggaran (Putra and Rasmini, 2019) 	Likert

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Transparansi (X3)	<p>Transparansi adalah sebuah prinsip yang memberikan kebebasan kepada masyarakat publik untuk memperoleh atau mengakses informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah atau organisasi mencakup perencanaan kebijakan sampai pelaksanaan kebijakan serta hasil yang diperoleh dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah (Krina, 2003)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi terkait pengelolaan keuangan desa • Adanya usaha pemerintah desa dalam menyajikan informasi pengelolaan desa melalui media masa atau website • Informasi yang disajikan kepada publik harus jelas, lengkap, dan mudah dipahami masyarakat (Putra and Rasmini, 2019). 	Likert

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Kompetensi perangkat desa (X4)	kompetensi adalah sebuah keahlian dan karakter yang harus dimiliki setiap pegawai negeri sipil yang dapat berupa keterampilan, pengetahuan, dan sikap perilaku dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya atas jabatan yang dimiliki, sehingga diharapkan kinerja dari para pegawai negeri sipil dapat dilakukan secara profesional, efisien, dan efektif (BKN, 2003)	<ul style="list-style-type: none"> • pemahaman mengenai pengelolaan keuangan desa. • Kemampuan dalam menyajikan laporan keuangan desa. • Adanya pelatihan teknis untuk meningkatkan keahlian dalam mengelola dana desa • memiliki inisiatif untuk melakukan pekerjaan lainnya yang ada pada pemerintah desa. • mengedepankan sikapnya berdasarkan kode 	Likert

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
		etik pegawai	
		pemerintah desa	
		(Rasmini and	
		Mimba 2021)	

3.6 Teknik Analisis

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan bahwa terdapat pengaruh antara akuntabilitas, partisipasi masyarakat, transparansi, dan kompetensi perangkat desa terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Pada riset ini, teknik analisis menggunakan analisis regresi linier berganda yang dilakukan dengan mengolah data kedalam *software IBM SPSS Statistic 25*. Dalam menganalisis data penelitian yang sudah terkumpul menggunakan teknik Tingkat Capaian Responden (TCR) yang dapat menggambarkan pemahaman para responden atas permasalahan yang sedang diteliti berdasarkan pernyataan-pernyataan yang ada dalam kuesioner. Menurut Sugiyono (2019) dalam menentukan klasifikasi tanggapan dari responden atas pernyataan maka terlebih dahulu menghitung interval dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Interval} = \frac{\text{Skor maksimum} - \text{skor minimum}}{\text{Banyaknya bilangan}} = \frac{5-1}{5} = 0,8$$

Sehingga dapat diperoleh beberapa kriteria jawaban responden atas masing-masing pernyataan atau variabel yang dapat diklasifikasikan antara lain:

4,24-5,00	= Sangat Tinggi
3,43-4,23	= Tinggi
2,62-3,42	= Sedang
1,81-2,61	= Rendah
1,00-1,80	= Sangat Rendah

3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan metode statistik yang dapat digunakan untuk melihat gambaran terkait demografi para responden atau perangkat desa yang telah mengisi kuesioner (nama, umur, jenis kelamin pendidikan terakhir, jabatan yang dimiliki, serta masa lamanya bekerja). Statistik deskriptif pada penelitian ini terdiri dari mean, maksimum, minimum, dan standar deviasi (Ghozali, 2018).

3.6.2 Uji Kualitas Data

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada seluruh perangkat desa. Sebelum data tersebut dianalisis, maka data tersebut perlu di Uji Validitas dan Uji Realibilitas agar dapat mengetahui bahwa kuesioner tersebut sudah di susun dapat digunakan untuk mengukur fenomena dan dapat memperoleh data yang sah atau valid.

3.6.2.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menunjukkan derajat ketepatan data yang sebenarnya terjadi terhadap data yang diperoleh peneliti (Sugiyono, 2017). Dengan Uji Validitas, peneliti dapat melakukan pengukuran apakah data yang sudah diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada responden merupakan data yang sudah valid atau tidak valid. Uji validitas pada penelitian ini dilakukan kepada responden sebanyak 92 Perangkat Desa di Kecamatan Sapuran dan Kecamatan Wonosobo. Uji validitas dapat dilakukan dengan menghitung korelasi atau hubungan antar indikator variabel dengan skor total yang menggunakan rumus product moment (r) yang terdiri dari 2 macam :

- Product moment (r) menggunakan simpangan

$$r_{xy} = \frac{\sum xy}{\sqrt{(\sum x^2)(\sum y^2)}}$$

- Product moment (r) menggunakan angka dasar

$$r_{xy} = \frac{n(\sum xy) - (\sum x \sum y)}{\sqrt{[n \sum x^2 - (\sum x)^2][n \sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

keterangan:

r_{xy} : Koefisien Korelasi

n : jumlah sampel Sampel

$\sum xy$: Jumlah perkalian variabel x dengan variabel y

$\sum x$: Jumlah nilai variabel x

$\sum y$: Jumlah nilai variabel y

$\sum x^2$: Jumlah pangkat dari nilai variabel x

$\sum y^2$: Jumlah pangkat dari nilai variabel y

Data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner dapat dikatakan valid atau sah jika pernyataan yang ada pada kuesioner dapat mengungkapkan atau mendeskripsikan sesuatu yang mampu diukur dengan kuesioner yang disebar. Uji signifikansi dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai r hitung dengan nilai r tabel dengan $df=n-2$. Pada uji validitas dasar yang digunakan dalam pengambilan keputusan jika:

- Jika $r \text{ tabel} < r \text{ hitung}$ maka pernyataan dapat dikatakan sah atau valid.
- Jika $r \text{ tabel} > r \text{ hitung}$ maka pernyataan dapat dikatakan tidak sah atau tidak valid.
- Jika r hitung bisa dilihat dalam kolom *corrected item total correlation*.

3.6.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat pengukuran untuk menguji kestabilan antara hasil penelitian yang dilakukan dengan waktu penyebaran kuesioner yang berbeda (Sugiyono, 2017). Uji reliabilitas berarti akan memperoleh hasil pengukuran menggunakan obyek serupa akan memperoleh data yang juga serupa.

Pada penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan responden sebanyak 92 perangkat desa di Kecamatan Sapuran yang telah diberikan kuesioner dengan pertanyaan yang sudah sah atau valid pada uji validitas yang kemudian akan diukur reliabilitasnya. Dalam pengambilan keputusan uji reliabilitas menggunakan kriteria sebagai berikut:

- Jika r -alpha menghasilkan nilai positif dan lebih besar dibanding dengan r -tabel maka pernyataan dapat dikatakan reliabel
- jika r -alpha menghasilkan nilai negatif dan lebih kecil dibanding dengan r -tabel maka pernyataan dapat dikatakan tidak reliabel

Teknik yang digunakan pada uji reliabilitas pernyataan dalam kuesioner dapat dikatakan reliabel jika pada uji statistik cronbach alpha yang menghasilkan nilai cronbach's alpha lebih besar dari 0,7 (Priyatno, 2013).

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

3.6.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan alat pengukuran yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah model regresi yang akan digunakan dalam penelitian memiliki data yang berdistribusi normal melalui uji Kolmogorov Smirnov dengan nilai

signifikansi 0,05(Ghozali, 2018). Dalam pengambilan keputusan pada uji normalitas sebagai berikut:

- Jika probabilitas $< 0,05$ maka data dapat dikatakan berdistribusi normal.
- Jika probabilitas $> 0,05$ maka data dapat dikatakan tidak berdistribusi normal.

3.6.3.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas adalah alat uji yang dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa terdapat korelasi dengan variabel bebas (variabel independen) pada model regresi pada penelitian yang akan dilakukan(Ghozali, 2018). Model regresi yang tidak ada korelasi dengan variabel independen merupakan model regresi yang baik untuk digunakan. Sedangkan adanya korelasi antara model regresi dengan variabel independen maka variabel tersebut tidak ortogal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas (variabel independen) yang mempunyai nilai hubungan dengan sesama variabel bebas sama dengan nol(Ghozali, 2018). Dalam pengambilan keputusan uji multikolonieritas dengan memperhatikan nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. jika *tolerance* $> 0,10$ dan *Variance Inflation Factor (VIF)* < 10 maka variabel independen pada model regresi terbebas dari multikolonieritas.

3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2018) uji yang mempunyai tujuan untuk melakukan pengujian antara residual dengan variance suatu penelitian dengan penelitian lain. Adanya heteroskedastisitas akan mengakibatkan model regresi tersebut tidak baik, sehingga model regresi yang baik adalah yang tidak memiliki heteroskedastisitas. Dalam pengambilan keputusan heteroskedastisitas berdasarkan uji gleyser yang

menguji apakah pada angka residual terdapat ketidaksamaan dengan variabel bebas.

Jika hasil sig. < 0,05 maka model regresi tidak ada gejala heterosiditas.

3.7 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi regresi linier berganda merupakan analisis statistik yang dapat digunakan untuk mengolah data penelitian serta pengambilan kesimpulan yang berarti mengenai hubungan yang ketergantungan variabel terhadap variabel lainnya (Drapper, 1992). Pada penelitian ini, analisis regresi linier berganda berfungsi untuk mengungkapkan atau menyatakan pengaruh antara variabel bebas kepada variabel terikat. Persamaan yang digunakan dalam analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Efektivitas pengelolaan dana desa

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien regresi

X_1 = Akuntabilitas

X_2 = Partisipasi Masyarakat

X_3 = Transparansi

X_4 = Kompetensi Perangkat Desa

3.8 Uji Kelayakan Model

Pengujian hipotesis dilakukan agar dapat mengetahui apakah pada penelitian ini variabel bebas atau variabel independen akuntabilitas, partisipasi masyarakat, transparansi dan kompetensi perangkat desa dapat memberikan pengaruh terhadap variabel dependen atau variabel terikat efektivitas pengelolaan dana desa.

3.8.1 Uji Signifikasi Simultan (Uji statistik F)

Menurut (Ghozali, 2016) Uji signifikasi simultan adalah uji statistik yang digunakan untuk menunjukkan bahwa apakah seluruh variabel independen (akuntabilitas, partisipasi masyarakat, transparansi, dan kompetensi perangkat desa) pada penelitian secara simultan atau bersama-sama memberikan pengaruh terhadap variabel dependen (efektivitas pengelolaan dana desa. Kemudian dasar pengambilan keputusan pada uji statistik t dengan menggunakan signifikansi 0,05 antara lain:

- Jika nilai sig. F < 0,05 maka hal tersebut dapat menunjukkan secara simultan variabel bebas (independen) memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel terikat (dependen)
- Jika nilai sig. F > 0,05 maka hal tersebut dapat menunjukkan secara simultan variabel bebas (independen) tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel terikat (dependen)

3.8.2 Koefisien Determinasi $r - Square$ atau (R^2)

Koefisien determinasi atau *r-square* adalah ukuran statistik pada model regresi yang digunakan dalam penelitian untuk mengukur seberapa jauh model

dalam menjelaskan variabel dependen atau variabel terikat (Ghozali, 2016). Nilai *r-square* (r^2) berada di antara satu dan nol. Nilai *r-square* yang angka 1 menjelaskan bahwa pada model regresi tersebut variabel dependen dapat memberikan hingga seluruh informasi yang diperlukan dalam memprediksi atau menduga variabel dependen atau variabel efektivitas pengelolaan dana desa.

3.8.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Menurut Ghozali (2016) Uji signifikansi parameter Individual adalah uji statistik yang digunakan untuk melihat seberapa jauh pengaruh yang diberikan variabel bebas (independen) kepada variabel terikat (dependen) secara parsial. Dasar dalam pengambilan keputusan pada uji signifikansi parameter individual (uji t) dengan menggunakan signifikansi 0,05 antara lain:

1. Akuntabilitas berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa

$H_{01} : \beta \leq 0$ artinya akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa

$H_{a1} : \beta > 0$ artinya akuntabilitas berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa

2. Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa

$H_{02} : \beta \leq 0$ artinya partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa

$H_{a2} : \beta > 0$ artinya partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa

3. Transparansi berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa

$H_{03} : \beta \leq 0$ artinya transparansi tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa

$H_{a3} : \beta > 0$ artinya transparansi berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa

4. Kompetensi perangkat desa berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa

$H_{04} : \beta \leq 0$ artinya kompetensi perangkat desa tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa

$H_{a4} : \beta > 0$ artinya kompetensi perangkat desa berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa

Selanjutnya dalam penerimaan atau penolakan hipotesis berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Hipotesis positif

Jika tingkat signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima, jika signifikansi $< 0,05$ maka H_a diterima.

2. Hipotesis Negatif

Jika tingkat signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak, jika signifikansi $> 0,05$ H_a ditolak.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Distribusi Penyebaran Kuesioner

Pada penelitian ini populasi yang akan digunakan adalah dua Kecamatan di Kabupaten Wonosobo yaitu kecamatan Sapuran dan Kecamatan Wonosobo. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis adanya pengaruh *Good governance* dan Kompetensi perangkat desa terhadap Efektivitas pengelolaan dana desa, terdapat 23 desa yang terdiri dari 16 desa di Kecamatan Sapuran dan 7 di Kecamatan Wonosobo. Kemudian data yang akan digunakan pada penelitian merupakan data primer yang berasal dari tanggapan para responden terhadap beberapa pernyataan pada kuesioner yang diberikan kepada Kepala Desa, Kaur Keuangan (bendahara desa), sekretaris desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk setiap desa. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh dimana seluruh populasi dijadikan sampel sehingga memperoleh responden atau sampel pada penelitian ini sejumlah 92 responden. Data pada penelitian ini diperoleh dari penyebaran kuesioner langsung oleh peneliti ke masing-masing desa (*field survey*). Untuk distribusi sampel penelitian sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Distribusi Sampel Penelitian

Keterangan	Total
Jumlah kuesioner yang telah disebar	92
Jumlah kuesioner yang telah kembali	92
Kuesioner yang tidak sah	0
Tingkat respon	100%

Sumber: Data yang sudah diolah peneliti, 2022

Berdasarkan tabel diatas, sejumlah 92 (100%) kuesioner yang telah disebar kepada perangkat desa, semua kuesioner telah diterima kembali oleh peneliti dan tidak ada kuesioner tidak sah atau tidak kembali sehingga kuesioner yang diolah pada penelitian ini dengan total 92 data.

4.1.2 Karakteristik Sampel atau Responden

Karakteristik sampel atau responden pada penelitian ini akan dikelompokkan menurut identitas responden yang berdasarkan jenis kelamin (*gender*), umur, jenjang pendidikan terakhir, jabatan, dan lama masa kerja sebagai berikut:

Tabel 4. 2
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin (gender)

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	75	81,5%
Perempuan	17	18,5%
Total	92	100%

Sumber: Data yang sudah diolah peneliti, 2022

Berdasarkan tabel 4.2, dapat diketahui bahwa dari 92 responden yang telah mengisi kuesioner terdiri 75 laki-laki dan 17 perempuan. Sehingga perangkat desa yang ada di Kecamatan Sapuran dan Kecamatan Wonosobo didominasi oleh

perangkat desa laki-laki yang menduduki jabatan Kepala desa, Sekretaris des (sekdes), Bendahara desa (Kaur Keuangan, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Tabel 4. 3
Karakteristik Responden berdasarkan Umur

Usia	Jumlah	Persentase	Klasifikasi
26-35 tahun	19	20,7%	Dewasa awal
36-45 tahun	36	39,1%	Dewasa Akhir
46-55 tahun	32	34,8%	Lansia awal
56-65 tahun	5	5,4%	Lansia akhir
Total	92	100%	

Sumber: Data yang sudah diolah peneliti, 2022

Berdasarkan tabel diatas, karakteristik responden berdasarkan umur pada penelitian ini dikelompokkan menjadi 4 bagian yaitu dewasa awal (26-35 tahun), dewasa akhir (36-45 tahun), lansia awal (46-55 tahun), lansia akhir (56-65 tahun). Persentase tertinggi pada perangkat desa yang sudah memasuki masa dewasa akhir sebanyak 36 orang (39,1%). Kemudian disusul dengan perangkat desa yang memasuki fase lansia awal sebanyak 32 orang (34,8%). Perangkat desa dengan fase dewasa akhir sebanyak 19 orang (20,7%). Sedangkan persentase terendah pada perangkat desa yang berada di fase lansia akhir dengan jumlah 5 orang (5,4%). Hal tersebut menunjukkan bahwa yang menjabat sebagai perangkat desa sebagian besar diduduki oleh masyarakat yang yang memasuki fase dewasa akhir yang dianggap dapat bekerja dan memiliki keahlian yang baik dalam pemerintahan desa (Indati, 2019).

Tabel 4. 4
Karakteristik Responden berdasarkan Jenjang Pendidikan terakhir

Pendidikan	Jumlah	Persentase
SD	1	1,1%
SMP	2	2,2%

SMA	70	76,1%
Diploma	6	6,5%
Sarjana	13	14,1%
Total	92	100%

Sumber: Data yang sudah diolah peneliti, 2022

Berdasarkan tabel 4.4, pada penelitian ini tingkat pendidikan responden diklasifikasikan menjadi 5 tingkatan mulai dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Diploma, dan Sarjana. Tingkat pendidikan SD memiliki persentase 1,1% atau terdapat 1 orang dan tingkat pendidikan SMP terdapat 2 orang atau dengan persentase 2,2%. Perangkat desa dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak 70 orang atau dengan persentase 76,1%. Sedangkan perangkat desa dengan pendidikan Diploma dan Sarjana masing-masing terdapat 6 orang (6,5%) dan 13 orang (14,1%). Sehingga dapat menunjukkan bahwa mayoritas perangkat desa memiliki tingkat pendidikan SMA yang diasumsikan telah mempunyai pemahaman, kemampuan, dan pengetahuan ketika bekerja (Habib, 2021). Namun juga terdapat perangkat desa yang menjabat sebagai BPD di pemerintahan desa Batusari, wonosari, dan karangsari memiliki tingkat pendidikan SMP dan SD.

Tabel 4. 5
Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah	Persentase
Kepala Desa	23	25%
Sekretaris Desa	23	25%
Bendahara Desa	23	25%
Badan Permusyawaratan Desa	23	25%
Total	92	100%

Sumber: Data yang sudah diolah peneliti, 2022

Dari tabel diatas, penelitian ini terdiri dari responden yang menduduki jabatan kepala desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Badan

Permasyarakatan Desa dengan jumlah masing-masing jabatan sebanyak 23 responden. hal tersebut dikarenakan jabatan tersebut yang bertindak langsung dalam pengelolaan pemerintahan desa terutama keuangan desa.

Tabel 4. 6
Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Masa Kerja

Lama Masa Kerja	Jumlah	Persentase
<5 tahun	26	28,3%
5-10 tahun	41	44,6%
10-15 tahun	22	23,9%
15-20 tahun	2	2,2%
>20 tahun	1	1,1%

Sumber: Data yang sudah diolah peneliti, 2022

Dari tabel 4.6, lama masa kerja perangkat desa pada penelitian ini dikelompokkan menjadi 5 klasifikasi. Untuk masa kerja <5 tahun terdapat 26 orang (28,3%) dan masa kerja 5-10 tahun terdapat 41 orang (44,6%). Kemudian perangkat desa yang mempunyai masa kerja 10-15 tahun dengan persentase 23,9% atau sebanyak 22 orang. Masa kerja 15-20 dan >20 memiliki persentase rendah yaitu hanya 2,2% dan 1,1%. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa sebagian besar perangkat desa memiliki lama masa kerja 5-10 tahun sehingga dalam bekerja sudah lebih baik karena sudah berpengalaman dibidangnya (Muamarizal, Samsir, and Marzolina 2015).

4.2 Analisis Data

4.2.1 Hasil Analisis Deskriptif Variabel

Analisis deskriptif pada penelitian ini akan menjelaskan deskripsi mengenai data para responden dalam menanggapi beberapa pernyataan yang ada pada kuesioner. Berikut hasil statistik deskriptif variabel.

Tabel 4. 7
Deskriptif variabel

Descriptive Statistics					
	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
Akuntabilitas	92	35	65	55.61	5.759
Partisipasi Masyarakat	92	33	50	43.35	4.331
Transparansi	92	38	55	47.42	4.259
Kompetensi Perangkat Desa	92	42	65	54.78	5.262
Efektivitas Pengelolaan Dana Desa	92	31	55	48.11	4.173
Valid N (listwise)	92				

Sumber: Data setelah diolah peneliti, 2022

Berdasarkan tabel 4.7, peneliti dapat mendeskripsikan variabel pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Jumlah pengukuran variabel akuntabilitas (N) sebanyak 92 data. Akuntabilitas memiliki nilai maksimum 65, nilai minimum 35, dan mean 55,61. Nilai standar deviasi 5,759 yang lebih kecil dibanding nilai mean yang artinya penyebaran data baik atau penyimpangan rendah.
2. Jumlah pengukuran variabel Partisipasi Masyarakat (N) sebanyak 92 data. Partisipasi Masyarakat memiliki nilai maksimum 50, nilai minimum 33, dan mean 43,35. Nilai standar deviasi 4,331 yang lebih kecil dibanding nilai mean yang artinya penyebaran data baik atau penyimpangan rendah.
3. Jumlah pengukuran variabel Transparansi (N) sebanyak 92 data. Transparansi memiliki nilai maksimum 55, nilai minimum 38, dan mean 47,42. Nilai standar deviasi 4,259 yang lebih kecil dibanding nilai mean yang artinya penyebaran data baik atau penyimpangan rendah.

4. Jumlah pengukuran variabel Kompetensi Perangkat Desa (N) sebanyak 92 data. Kompetensi perangkat desa memiliki nilai maksimum 65, nilai minimum 42, dan mean 54,78. Nilai standar deviasi 5,262 yang lebih kecil dibanding nilai mean yang artinya penyebaran data baik atau penyimpangan rendah.
5. Jumlah pengukuran variabel efektivitas pengelolaan dana desa (N) sebanyak 92 data. Efektivitas pengelolaan dana desa memiliki nilai maksimum 55, nilai minimum 31, dan mean 48,11. Nilai standar deviasi 4,173 yang lebih kecil dibanding nilai mean yang artinya penyebaran data baik atau penyimpangan rendah.

4.2.2 Tingkat Capaian Responden (TCR)

Tingkat Capaian Responden (TCR) pada penelitian ini menggambarkan pemahaman para responden atas permasalahan yang sedang diteliti berdasarkan pernyataan-pernyataan yang ada dalam kuesioner. Tingkat Capaian Responden Variabel

4.2.2.1 Tingkat Capaian Responden Variabel Akuntabilitas (X1)

Variabel Akuntabilitas(X1) pada penelitian ini diukur menggunakan 13 pertanyaan, dimana hasil tanggapan dan tingkat capaian responden terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 8
Tingkat Capaian Responden Variabel Akuntabilitas

No	Akuntabilitas	Skala Tanggapan Responden					Skor Index
		1	2	3	4	5	
1	X1.1	0	4	18	176	200	4,33
2	X1.2	0	4	15	192	185	4,30
3	X1.3	0	0	9	204	190	4,38
4	X1.4	1	0	21	196	175	4,27

5	X1.5	0	2	24	196	170	4,26
6	X1.6	0	0	21	200	175	4,30
7	X1.7	0	0	36	216	130	4,15
8	X1.8	1	2	57	212	90	3,93
9	X1.9	0	2	33	180	175	4,24
10	X1.10	0	2	24	200	165	4,25
11	X1.11	0	0	15	148	250	4,49
12	X1.12	0	0	21	192	185	4,33
13	X1.13	0	0	24	168	210	4,37
Rata-rata Skor indeks variabel							4,28

Sumber: Data yang sudah diolah peneliti, 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui hasil rata-rata masing pernyataan pada kuesioner akuntabilitas, pernyataan pada X1.11 yang berbunyi “Pengeluaran biaya desa pada APBDesa dapat dilaksanakan jika Raperdes tentang APBDesa setelah disahkan menjadi peraturan desa“memiliki nilai rata-rata skor indeks tertinggi yaitu 4,49. Hal tersebut menunjukkan bahwa perangkat desa mampu menerapkan prinsip akuntabilitas dimana adanya kepatuhan terhadap Permendagri no 113 tahun 2014. Sedangkan pernyataan X1,8 yang berbunyi “ saya telah melaporkan rincian penggunaan dana desa kepada masyarakat secara periodik” menunjukkan rata-rata skor indeks terendah dibanding dengan pernyataan lainnya namun rata-rata tersebut tergolong tinggi karena masih berada diatas 3,42. Hal tersebut menunjukkan bahwa informasi yang disajikan kepada masyarakat berupa spanduk yang memberikan informasi berupa akun induk sedangkan rinciannya berada di kantor desa yang dapat diakses secara langsung maupun di laman web kecamatan masing-masing.

4.2.2.2 Tingkat Capaian Responden Variabel Partisipasi Masyarakat(X2)

Variabel Partisipasi Masyarakat(X2) pada penelitian ini diukur menggunakan 10 butir pernyataan, dimana hasil tanggapan dan tingkat capaian responden terdapat pada tabel di berikut.

Tabel 4. 9
Tingkat Capaian Responden Variabel Partisipasi Masyarakat(X2)

NO	Partisipasi Masyarakat	Skala Tanggapan Responden					Skor Indek
		1	2	3	4	5	
1	X2.1	0	4	9	120	285	4,54
2	X2.2	0	2	18	188	190	4,33
3	X2.3	0	0	12	236	145	4,27
4	X2.4	0	2	9	212	175	4,33
5	X2.5	0	0	15	172	220	4,42
6	X2.6	0	2	9	196	195	4,37
7	X2.7	0	2	51	172	155	4,13
8	X2.8	0	2	18	204	170	4,28
9	X2.9	0	0	30	176	190	4,30
10	X2.10	0	0	15	188	200	4,38
Rata-rata Skor indeks variabel							4,34

Sumber: Data yang sudah diolah peneliti, 2022

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa rata-rata masing pernyataan pada kuesioner Partisipasi Masyarakat, pernyataan pada X2.1 yang berbunyi “Saya telah melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan mengenai perencanaan program kerja yang menggunakan anggaran dana desa” dengan rata-rata skor indeks 4,54 sehingga menunjukkan bahwa perangkat desa dalam mengelola keuangan desa telah melibatkan masyarakat sebagai pemberi wewenang atau kekuasaan terutama dalam perencanaan program kerja agar dana desa dapat dikelola dengan baik. Sedangkan pernyataan X2.7 yang berbunyi “saya memperoleh penghargaan dari masyarakat ketika dapat mencapai keberhasilan dalam pengelolaan dana desa”

mempunyai rata-rata skor index 4,13 terendah dibanding dengan pernyataan lainnya sebab tidak semua perangkat desa memperoleh penghargaan dimana masyarakat memberikan penghargaan kepada kepala desa selaku penanggungjawab seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan desa.

4.2.2.3 Tingkat Capaian Responden Variabel Transparansi (X3)

Variabel Transparansi (X3) pada penelitian ini diukur menggunakan 11 butir pernyataan.

Tabel 4. 10
Tingkat Capaian Responden Variabel Transparansi(X3)

NO	Transparansi	Skala Tanggapan Responden					Skor Index
		1	2	3	4	5	
1	X3.1	0	0	3	180	230	4,49
2	X3.2	0	0	3	208	195	4,41
3	X3.3	0	0	9	228	160	4,32
4	X3.4	1	2	30	208	140	4,14
5	X3.5	0	4	48	200	120	4,04
6	X3.6	0	2	27	204	155	4,22
7	X3.7	0	2	24	196	170	4,26
8	X3.8	0	0	9	212	180	4,36
9	X3.9	0	2	3	156	255	4,52
10	X3.10	0	0	12	200	190	4,37
11	X3.11	0	0	12	228	155	4,29
Rata-rata skor indek Variabel							4,31

Sumber: Data yang sudah diolah peneliti, 2022

Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat bahwa rata-rata masing pernyataan pada kuesioner transparansi, pernyataan pada X3.9 yang berbunyi “jumlah dana desa telah diinformasikan kepada masyarakat secara akurat dan tepat” memiliki nilai tertinggi yaitu 4,52. Hal ini menjelaskan bahwa perangkat desa dalam mengelola dana desa menerapkan prinsip transparansi dimana jumlah dana desa yang ada di kantor desa disajikan secara tepat dan akurat kepada masyarakat. Untuk

rata-rata skor indeks terendah dibanding pernyataan lain namun tergolong tinggi adalah pada pernyataan X3.5 yang berbunyi “untuk meningkatkan transparansi, saya memberikan pengumuman mengenai pengelolaan dana desa kepada seluruh masyarakat” dengan nilai rata-rata skor indeks 4,04 sehingga menunjukkan bahwa perangkat desa dalam memberikan informasi dana desa biasanya disajikan di depan kantor desa dan jarang memberikan pengumuman kepada tiap-tiap dusun sehingga masyarakat hanya dapat melihat alokasi dana desa dengan datang ke kantor desa sebab dengan menyajikan informasi di kantor desa agar dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

4.2.2.4 Tingkat Capaian Responden Variabel Kompetensi Perangkat Desa(X4)

Variabel Transparansi(X3) pada penelitian ini diukur menggunakan 13 butir pernyataan.

Tabel 4. 11
Tingkat Capaian Responden Variabel Kompetensi Perangkat Desa(X4)

NO	Kompetensi Perangkat Desa	Skala Tanggapan Responden					Skor Index
		1	2	3	4	5	
1	X4.1	0	0	45	192	145	4,15
2	X4.2	0	0	33	216	135	4,17
3	X4.3	0	12	42	240	60	3,85
4	X4.4	0	0	42	224	110	4,09
5	X4.5	0	0	39	212	130	4,14
6	X4.6	0	0	18	204	175	4,32
7	X4.7	0	0	9	132	280	4,58
8	X4.8	0	0	21	196	180	4,32
9	X4.9	0	0	24	180	195	4,34
10	X4.10	0	0	24	196	175	4,29
11	X4.11	0	4	27	212	140	4,16
12	X4.12	0	0	36	204	145	4,18
13	X4.13	0	0	30	216	140	4,20

Rata-rata Skor indeks variabel

4,21

Sumber: Data yang sudah diolah peneliti, 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui nilai rata-rata masing pernyataan pada kuesioner Kompetensi perangkat desa, pernyataan pada X4.7 yang berbunyi “saya selalu berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat, rekan kerja, dan atasan” dengan angka 4,58. Hal tersebut menjelaskan bahwa perangkat desa menyadari memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sedangkan pernyataan X4.3 yang berbunyi “Saya telah melakukan pencatatan yang mendasar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)” memiliki rata-rata 3,85 yang masih termasuk tinggi sehingga perangkat desa dalam melakukan pencatatan pengelolaan dana desa telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

4.2.2.5 Tingkat Capaian Responden Variabel Efektivitas Pengelolaan Dana Desa(Y)

Variabel Efektivitas Pengelolaan Dana Desa(Y) pada penelitian ini diukur menggunakan 11 pertanyaan, dimana hasil tanggapan dan tingkat capaian responden terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 12
Tingkat Capaian Responden Variabel Efektivitas Pengelolaan Dana Desa(Y)

NO	Efektivitas Pengelolaan Dana Desa	Skala Tanggapan Responden					Skor Index
		1	2	3	4	5	
1	Y1	0	2	6	136	275	4,55
2	Y2	0	2	9	164	235	4,46
3	Y3	0	0	12	72	350	4,72
4	Y4	0	0	12	152	250	4,50
5	Y5	0	4	30	212	135	4,14
6	Y6	0	2	21	200	170	4,27

7	Y7	0	0	39	156	200	4,29
8	Y8	0	0	27	216	145	4,22
9	Y9	0	2	3	212	185	4,37
10	Y10	0	0	3	244	150	4,32
11	Y11	0	0	3	200	205	4,43
Rata-rata skor indeks Variabel							4,39

Sumber: Data yang sudah diolah peneliti, 2022

Berdasarkan tabel 4.12, dapat dilihat bahwa rata-rata masing pernyataan pada kuesioner efektivitas pengelolaan dana desa, pernyataan pada Y3 yang berbunyi “Tujuan pengelolaan dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat” menjadi pernyataan dengan rata-rata skor indeks tertinggi yaitu sebesar 4,72 sehingga dapat menunjukkan bahwa perangkat desa dalam mengelola dana desa berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sebab tujuan utama dari alokasi dana desa adalah dapat mensejahterakan seluruh masyarakat. Sedangkan pernyataan dengan rata-rata skor indeks terendah dibanding indikator lainnya adalah pernyataan Y5 yang berbunyi “dalam melakukan perencanaan program penggunaan dana desa mengacu pada APBDesa tahun sebelumnya” dengan angka 4,14. Hal tersebut menjelaskan bahwa tidak sepenuhnya perencanaan program mengacu pada APBDesa tahun sebelumnya tetapi juga mengacu kondisi masyarakat sebab tidak semua program APBDesa tahun sebelumnya masih relevan untuk dilanjutkan atau sudah selesai, akan tetapi APBDesa tetap menjadi pertimbangan dalam perencanaan program pengelolaan dana desa.

4.3 Hasil Uji Kualitas Data

4.3.1 Hasil Uji Validitas

Uji validitas dalam penelitian ini digunakan untuk menyatakan bahwa pernyataan yang ada pada kuesioner mendeskripsikan mendeskripsikan seluruh variabel (akuntabilitas(X1), partisipasi masyarakat(X2), transparansi(X3), kompetensi perangkat desa(X4), dan efektivitas pengelolaan dana desa(Y)) dimana keputusan diambil untuk menyatakan data valid atau tidak berdasarkan nilai $r_{Hitung} > r_{Tabel}$. Berikut hasil uji validitas data pada penelitian ini:

Tabel 4. 13
Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	rTabel	rHitung	Keterangan	
X1	Akuntabilitas	0,2050	1	0,623	Valid
			2	0,608	Valid
			3	0,719	Valid
			4	0,703	Valid
			5	0,587	Valid
			6	0,569	Valid
			7	0,691	Valid
			8	0,645	Valid
			9	0,663	Valid
			10	0,799	Valid
			11	0,756	Valid
			12	0,762	Valid
			13	0,736	Valid
X2	Partisipasi Masyarakat	0,2050	1	0,586	Valid
			2	0,658	Valid
			3	0,678	Valid
			4	0,753	Valid
			5	0,728	Valid
			6	0,813	Valid
			7	0,575	Valid
			8	0,604	Valid
			9	0,756	Valid
			10	0,735	Valid
X3	Transparansi	0,2050	1	0,615	Valid
			2	0,743	Valid

Variabel	Pernyataan	rTabel	rHitung	Keterangan
			0,720	Valid
			0,676	Valid
			0,652	Valid
			0,659	Valid
			0,706	Valid
			0,704	Valid
			0,503	Valid
			0,638	Valid
			0,471	Valid
			0,745	Valid
			0,619	Valid
			0,602	Valid
			0,576	Valid
			0,526	Valid
			0,626	Valid
X4	Kompetensi Perangkat Desa	0,2050	0,603	Valid
			0,628	Valid
			0,625	Valid
			0,733	Valid
			0,609	Valid
			0,750	Valid
			0,648	Valid
			0,599	Valid
			0,738	Valid
			0,607	Valid
			0,451	Valid
	Efektivitas		0,614	Valid
Y	Pengelolaan Dana Desa	0,2050	0,651	Valid
			0,681	Valid
			0,549	Valid
			0,705	Valid
			0,612	Valid
			0,641	Valid

Sumber: Data yang sudah diolah peneliti, 2022

Berdasarkan tabel hasil uji validitas, dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan yang berkaitan dengan variabel independen (akuntabilitas, partisipasi masyarakat, transparansi, dan kompetensi perangkat desa) dan variabel dependen (efektivitas pengelolaan dana desa) memiliki nilai $r_{Hitung} > r_{Tabel}$ atau seluruh hasil r_{Hitung}

$> 0,2050$. Hal tersebut dapat diartikan bahwa seluruh pernyataan pada kuesioner dinyatakan valid dan mampu mendeskripsikan seluruh variabel.

4.3.2 Hasil Uji Realibilitas

Uji Realibilitas bertujuan untuk menunjukkan konsistensi alat ukur yang digunakan dapat dipercaya dan jika pengukuran diulang maka hasilnya akan tetap konsisten. Data dapat dikatakan reliabel jika nilai Cronbach's Alpha $> 0,70$. Berikut hasil uji reliabilitas yang dapat diketahui di tabel 4.13.

Tabel 4. 14
Hasil Uji Realibilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Akuntabilitas (X1)	0,902	Reliabel
Partisipasi Masyarakat (X2)	0,872	Reliabel
Transparansi (X3)	0,856	Reliabel
Kompetensi Perangkat Desa (X4)	0,878	Reliabel
Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0,836	Reliabel

Sumber: Data yang sudah diolah peneliti, 2022

Berdasarkan tabel hasil uji Reliabilitas, dapat dilihat nilai cronbach's Alpha masing-masing variabel dimana variabel Akuntabilitas(X1) memperoleh nilai 0,902, Partisipasi Masyarakat(X2) mendapatkan nilai 0,872, Transparansi(X3) dengan nilai 0,856, Kompetensi perangkat desa memperoleh nilai 0,878, dan Efektivitas Pengelolaan dana Desa(Y) mendapatkan nilai 0,836. Hal tersebut telah menunjukkan bahwa masing-masing variabel memiliki nilai cronbach's alpha $> 0,70$ sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel pada penelitian ini reliabel atau konsisten.

4.4 Hasil Uji Asumsi Klasik

Untuk memperoleh model regresi yang tepat dan dapat menghasilkan rumus perhitungan yang akurat, maka harus memenuhi uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik pada penelitian ini menggunakan uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas.

4.4.1 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual pada model regresi memiliki distribusi normal atau tidak normal. Untuk menguji normalitas data menggunakan Uji K-S (*Kolmogorov-Smirnov*) dimana dasar pengambilan keputusan menggunakan tingkat signifikansi dari nilai residual $> 0,05$ dan sebaliknya jika signifikansi $< 0,05$ maka Data tidak berdistribusi normal. Hal tersebut dapat kita lihat dalam tabel hasil uji normalitas berikut.

Tabel 4. 15
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		92
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.77866914
Most Extreme Differences	Absolute	.083
	Positive	.083
	Negative	-.076
Test Statistic		.083
Asymp. Sig. (2-tailed)		.143 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data yang sudah diolah peneliti, 2022

Berdasarkan tabel 4.14 menunjukkan bahwa hasil uji normalitas pada penelitian ini menghasilkan asymp. Signifikansi sebesar 143 setelah diuji menggunakan K-S(*kolmogorov-smirnov*) yang artinya lebih besar daripada 0,05 sehingga data dapat disimpulkan jika model regresi berdistribusi normal.

4.4.2 Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas memiliki tujuan untuk mengetahui jika model regresi yang akan digunakan mempunyai korelasi yang sempurna dengan variabel independen. Dalam pengambilan keputusan hasil uji multikolinieritas dapat melihat nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor* (VIF) yang disajikan dibawah ini.

Tabel 4. 16
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Akuntabilitas	0,419	2,389
Partisipasi Masyarakat	0,400	2,501
Transparansi	0,516	1,939
Kompetensi Perangkat Desa	0,630	1,586

Sumber: Data yang sudah diolah peneliti, 2022

Berdasarkan Tabel 4.15 hasil uji Multikolinieritas, menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas atau variabel independen (akuntabilitas(X1), Partisipasi Masyarakat(X2), Transparansi(X3), dan kompetensi perangkat desa (X4)) memperoleh nilai tolerance > 0,10(10% dan angka VIF dibawah 10. Hal ini menjelaskan bahwa model regresi bebas multikolinieritas.

4.4.3 Hasil Uji Heteroskedasitas

Uji heteroskedasitas mempunyai tujuan untuk menguji apakah model persamaan regresi tidak terjadi kesamaan variance dengan nilai residual dari suatu

penelitian dengan penelitian yang lain. Persamaan regresi yang baik adalah persamaan yang tidak mengandung adanya gejala heteroskedasitas maka ketika diuji menggunakan pengujian glesjer menghasilkan nilai sig. lebih besar dari 0,05.

Tabel 4. 17
Hasil Uji Heteroskedasitas

Variabel	Sig.
Akuntabilitas	0,103
Partisipasi Masyarakat	0,117
Transparansi	0,365
Kompetensi Perangkat Desa	0,949

Sumber: Data yang sudah diolah peneliti, 2022

Pada tabel hasil uji heteroskedasitas diatas, dapat dilihat bahwa semua variabel bebas mendapatkan nilai sig. lebih besar dari 0,05. Hal tersebut telah menunjukkan model persamaan regresi pada penelitian ini bebas dari gejala heteroskedasitas.

4.5 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk menyatakan bahwa adanya pengaruh variabel bebas (akuntabilitas(X1), partisipasi masyarakat(X2), transparansi(X3), dan Kompetensi perangkat desa(X4)) kepada variabel terikat (efektivitas pengelolaan dana desa). Hasil persamaan regresi linier berganda didapatkan melalui pengolahan data dengan program SPSS yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 18
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a			
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	4,383	2,410	
Akuntabilitas	0,403	0,051	0,556
Partisipasi Masyarakat	0,171	0,070	0,178
Transparansi	0,148	0,062	0,151
Kompetensi Perangkat Desa	0,125	0,046	0,157

Sumber: Data yang sudah diolah peneliti, 2022

Pada tabel hasil analisis regresi linier berganda diatas dapat diperoleh model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$Y = 4,383 + 0,403X_1 + 0,171X_2 + 0,148X_3 + 0,125 X_4 + e$$

Keterangan:

X_1 = Akuntabilitas

X_2 = Partisipasi Masyarakat

X_3 = Transparansi

X_4 = Kompetensi Perangkat Desa

Dari model regresi yang diperoleh, maka dapat menjelaskan mengenai hal sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (*constant*) diperoleh sebesar 4,383 memiliki arti jika akuntabilitas, partisipasi masyarakat, transparansi dan kompetensi perangkat desa constant atau tidak ada penambahan ataupun pengurangan, maka efektivitas pengelolaan dana desa bernilai positif sebesar 4,384.

2. Nilai koefisien pada variabel akuntabilitas bernilai 0,403 (positif), yang artinya jika akuntabilitas meningkat sedangkan variabel independen lainnya tetap, maka efektivitas pengelolaan dana desa akan meningkat sebesar 0,403.
3. Nilai koefisien pada variabel partisipasi masyarakat mendapatkan nilai 0,171 memiliki arti bahwa jika ada peningkatan satuan dari variabel partisipasi masyarakat dengan variabel bebas lainnya tetap, maka efektivitas pengelolaan dana desa akan meningkat positif sebesar 0,171.
4. Nilai koefisien pada variabel transparansi memperoleh nilai positif sebesar 0,148 yang berarti ketika ada peningkatan satuan dari transparansi dan variabel independen lainnya tetap sehingga akan mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa akan meningkat sebesar 0,148.
5. Nilai koefisien pada variabel kompetensi perangkat desa bernilai 0,125 yang artinya jika ada peningkatan kompetensi perangkat desa dengan variabel bebas tetap akan menyebabkan peningkatan pada efektivitas pengelolaan dana desa sebesar 0,125.

4.6 Uji Kelayakan Model

4.6.1 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji simultan (uji F) memiliki tujuan untuk mengukur apakah seluruh variabel bebas (akuntabilitas, partisipasi masyarakat, transparansi, dan kompetensi perangkat desa) pada model persamaan regresi dapat mempengaruhi variabel terikat (efektivitas pengelolaan dana desa) secara simultan atau bersama-sama. Kriteria dalam pengambilan keputusan pada penelitian ini dengan melihat nilai sig. dimana

dapat dikatakan berpengaruh jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan sebaliknya jika nilai sign. lebih dari 0,05 maka tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan.

Tabel 4. 19
Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1297,020	4	324,255	97,988	.000 ^b
	Residual	287,893	87	3,309		
	Total	1584,913	91			

Sumber: Data yang sudah diolah peneliti, 2022

Hasil uji F pada tabel 4.19 menunjukkan Fhitung sebesar $97,988 > 2,480$ tingkat signifikansi pada penelitian ini sebesar $0,000 < 0,05$ yang mengartikan bahwa semua variabel bebas (akuntabilitas, partisipasi masyarakat, transparansi, dan kompetensi perangkat desa) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap variabel terikat (efektivitas pengelolaan dana desa).

4.6.2 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil uji koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur dan mengetahui jika model regresi yang digunakan dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel dependen atau variabel terikat. Hasil uji koefisien determinasi semakin mendekati angka satu maka akan semakin kuat model regresi dalam mendeskripsikan variabel independen (variabel bebas) terhadap variabel dependen (variabel terikat). Berdasarkan pengolahan data dapat diperoleh hasil uji koefisien determinasi (R^2) dibawah ini.

Tabel 4. 20
Hasil Uji Koefisien Determinas

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.905 ^a	0,818	0,810	1,819

a. Predictors: (Constant), Kompetensi Perangkat Desa, Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat

Sumber: Data yang sudah diolah peneliti, 2022

Pada hasil koefisien determinasi (R^2) diatas memperoleh hasil R-Square sebesar 0,818 atau 81,8% sehingga dapat diketahui bahwa variabel akuntabilitas, partisipasi masyarakat, transparansi, dan kompetensi perangkat desa (variabel independen) secara signifikan mampu menjelaskan efektivitas pengelolaan dana desa (variabel dependen) sebesar 81,8% sedangkan sisanya 18,2% dijelaskan oleh faktor lainnya yang tidak terdapat pada penelitian ini.

4.6.3 Hasil Uji Parsial (Uji T)

Uji parsial (uji T) pada penelitian ini digunakan untuk mengukur dan mengetahui jika terdapat pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Kriteria dalam pengambilan keputusan adalah dengan melihat tingkat signifikansi masing-masing variabel independen. Dapat dikatakan berpengaruh secara parsial jika tingkat sig. lebih kecil dari 0,05 dan sebaliknya jika tingkat sig. lebih besar dari 0,05 maka secara parsial variabel independen tidak memiliki pengaruh kepada variabel dependen.

Tabel 4. 21
Hasil Uji Parsial (Uji T)

Model	T	Sig.	Hasil	Keterangan
1 (Constant)	1,819	0,072		
Akuntabilitas	7,875	0,000	Positif signifikan	Hipotesis Diterima
Partisipasi Masyarakat	2,462	0,016	Positif signifikan	Hipotesis Diterima

Transparansi	2,380	0,019	Positif signifikan	Hipotesis Diterima
Kompetensi Perangkat Desa	2,735	0,008	Positif signifikan	Hipotesis Diterima

Sumber: Data yang sudah diolah peneliti, 2022

Pada tabel 4.20 terdapat hasil pengolahan data dimana hasilnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pengaruh akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana desa berdasarkan pengolahan data diperoleh thitung $7,875 > 1,98761$ dengan tingkat sig. sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dibanding dengan tingkat sig. 0,05 sehingga secara parsial adanya pengaruh positif signifikan antara akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Maka H1 dapat dinyatakan **“diterima”**.
2. Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengolahan dana desa pada tabel 4.20 diperoleh thitung $2,462 > 1,98761$ dengan tingkat sig. 0,016 lebih kecil dari 0,05 maka secara parsial partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa yang artinya bahwa H2 **“diterima”**.
3. Pengaruh tranparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana desa pada tabel hasil uji t diperoleh thitung $2,380 > 1,98761$ dan tingkat sig. $0,019 < 0,05$ sehingga secara parsial variabel tranparansi berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Maka H3 pada penelitian ini **“diterima”**.
4. Pengaruh kompetensi perangkat desa terhadap efektivitas pengelolaan dana desa berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.20 memperoleh thitung $2,735 > 1,98761$ dengan tingkat sig. 0,008 lebih kecil daripada 0,05 sehingga dapat mengindikasikan jika kompetensi perangkat desa berpengaruh positif

signifikansi terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Maka pada penelitian ini H4 “**diterima**”.

4.7 Pembahasan Penelitian

Berdasarkan data yang telah dilakukan pengujian terkait adanya pengaruh akuntabilitas, partisipasi masyarakat, transparansi, dan kompetensi perangkat desa terhadap efektivitas pengelolaan dana desa, maka dapat dilakukan analisis dan pembahasan penelitian sebagai berikut.

4.7.1 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan pengujian data yang sudah dilakukan bahwa adanya pengaruh antara akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Hasil ini menyatakan bahwa H1 diterima dikarenakan tingkat $\text{sig.} < 0,05$ sehingga membuktikan bahwa sebagai penerima wewenang dari masyarakat desa, suatu pemerintah desa harus dapat merealisasikan salah satu prinsip yaitu akuntabilitas dalam melaksanakan pengelolaan dana desa pada saat pelaporan sesuai dengan mekanisme yang berlaku terutama pertanggungjawabannya serta kepatuhan kepada standar akuntansi pemerintah (SAP). Berdasarkan rata-rata skor indeks variabel akuntabilitas diperoleh sebesar 4,28 yang termasuk dalam klasifikasi sangat tinggi, berarti responden dalam menanggapi dengan baik. Hal tersebut karena perangkat desa dalam setiap pertanggungjawaban anggaran dana desa berlandaskan undang-undang dan hukum yang telah berlaku agar dapat menghindari berbagai resiko terutama tindakan kolusi dan korupsi.

Sesuai dengan arahan dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan bahwa dalam setiap kegiatan pemerintahan desa melibatkan seluruh unit kerja, dalam hal ini kepala desa sebagai pemegang otoritas tertinggi ketika menyusun rancangan anggaran desa harus melibatkan seluruh perangkat desa (BPKP, 2021). Sehingga seluruh informasi yang disajikan mampu dipertanggungjawabkan dan dapat mencerminkan kondisi yang sesungguhnya pemerintahan desa kepada masyarakat yang sebagai pemberi wewenang agar dapat mencapai efektivitas pengelolaan dana desa.

Hasil pada penelitian ini sejalan dengan uraian Jensen and Meckling (1976) dalam agency theory dimana adanya pendelegasian wewenang dan kekuasaan dari masyarakat (*principal*) kepada perangkat desa (*agent*) untuk mengelola dana desa dan memberikan seluruh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti bahwa akuntabilitas sangat diperlukan dalam pemerintahan desa agar mampu menyajikan informasi yang mampu dipertanggungjawabkan agar efektivitas pengelolaan dana desa dapat terwujud. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif serta signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa, jika akuntabilitas perangkat desa meningkat maka akan berdampak pada peningkatan efektivitas pengelolaan dana desa.

Akuntabilitas adalah aspek yang sangat penting dalam pengelolaan pemerintahan desa, penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putra dan Rasmini (2019), Hindrayani dan Wati (2021) yang menyatakan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan kepada efektivitas pengelolaan dana desa. Namun berbanding terbalik dengan penelitian

yang dilakukan oleh Yanto dan Aqfir (2020) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.

4.7.2 Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian serta uji hipotesis yang sudah dilaksanakan, dapat diperoleh bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif serta signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. hal ini dapat dilihat dari tingkat sig. 0,016 yang mana lebih besar dibanding dengan 0,05 sehingga H2 dapat diterima. Partisipasi merupakan aspek yang penting untuk dilakukan pemerintahan desa, mengingat bahwa tujuan adanya alokasi dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sehingga partisipasi masyarakat diharapkan dapat mempersiapkan kemandirian dari masyarakat dalam menunjang perekonomian kearah yang lebih baik (Kemenkeu, 2022). Hasil analisis menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat secara langsung mampu meningkatkan pengelolaan dana desa sebab rata-rata nilai skor indeks tertinggi dibanding dengan variabel independen lainnya. Dengan adanya partisipasi masyarakat dapat menciptakan hubungan yang baik antara pemerintahan desa dengan masyarakat, karena dengan hal tersebut menjadikan perangkat desa mampu berinteraksi langsung dengan masyarakat desa. upaya yang dilakukan pemerintah desa sebagai wujud realisasi partisipasi masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait perencanaan program kerja yang menggunakan anggaran dana desa yang tertuang pada Kemendes PDPT No. 13 Tahun 2020. oleh sebab itu, partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan dalam pengelolaan dana desa

agar dapat memberdayakan masyarakat desa untuk mewujudkan kesejahteraan kehidupan masyarakat desa.

Penelitian ini sejalan dengan *agency theory* yang ditekankan oleh Eisenhardt (1989) bahwa salah satu yang mendasari teori agensi adalah *self interest* yang mementingkan kepentingan sendiri, Sehingga dalam hal ini keterlibatan masyarakat (*principal*) dalam pengambilan kebijakan serta perencanaan program pengelolaan dana desa oleh perangkat desa (*agent*) agar nantinya tujuan dari alokasi dana desa tidak untuk kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan bersama. Semakin tinggi partisipasi masyarakat maka akan meningkatkan ketepatan alokasi dana desa yang mampu mencapai efektivitas pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Putra dan Rasmini (2019), Ramadhani dan Yuliati (2021) yang menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. namun berbeda dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Yanto dan Aqfir (2020), Nazar et. all (2021) yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.

4.7.3 Pengaruh Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan pengolahan data, dapat dianalisis bahwa transparansi memiliki tingkat sig. 0,019 lebih kecil dibanding dengan 0,05 yang berarti H3 diterima sehingga dapat dinyatakan bahwa transparansi memiliki pengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Hasil analisis ini menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa dimana perangkat desa

telah berupaya untuk melakukan transparansi mengenai pengelolaan dana desa kepada seluruh masyarakat mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, seluruh informasi yang disajikan secara transparan. Semakin tinggi tingkat transparansi perangkat desa akan memberikan peningkatan pengelolaan dana desa yang baik untuk masyarakat. Hal ini sesuai isi Permendagri no 13 tahun 4 ayat 7 yang menyebutkan dengan adanya transparansi pengelolaan dana desa diharapkan dapat memberikan jaminan bagi seluruh masyarakat bebas mengakses informasi mengenai seluruh penyelenggaraan pemerintah.

Sesuai dengan dengan uraian Jensen and Meckling (1976) dalam *agency theory* terjadi hubungan *principal* dan *agent* akan memunculkan asimetri informasi dimana masyarakat (*principal*) tidak memperoleh informasi yang sama dengan perangkat desa (*agent*) mengenai alokasi dana desa. Sehingga dalam pengelolaan dana desa, perangkat desa harus dapat transparansi dengan memberikan informasi yang jelas dan akurat serta kemudahan untuk mengakses agar masyarakat dapat mengetahui seluruh penggunaan dana desa serta dapat mengawasi perangkat desa untuk tidak melakukan tindakan penyelewengan dana desa (Indonesian Corruption Watch, 2021).

Semakin tinggi tingkat transparansi pemerintahan desa maka mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilaksanakan oleh Putra dan Rasmini (2019), Ramadhani and Yuliati (2021) yang menyebutkan bahwa transparansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Namun berbeda dengan penelitian yang sudah dilakukan Sukmawati dan Nurfitriani

(2019) yang menjelaskan bahwa Transparansi tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan desa.

4.7.4 Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Hasil Uji statistik menunjukkan bahwa kompetensi perangkat desa berpengaruh positif serta signifikansi terhadap efektivitas pengelolaan dana desa yang berarti H4 pada penelitian telah diterima. Hal tersebut dibuktikan dengan pengolahan data yang memperoleh tingkat sig. 0,008 dan thitung 2,735. Tingkat signifikansi ini lebih tinggi dari 0,05 serta thitung lebih besar dari 1,98761 sehingga semakin tinggi tingkat kompetensi perangkat desa maka akan meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa. kompetensi perangkat desa adalah keahlian yang dimiliki individu yang dibutuhkan agar dalam melaksanakan kinerja dengan baik. Selain itu kompetensi perangkat desa dapat dikatakan faktor yang penting dalam pemerintahan desa karena dengan kompetensi yang tinggi, perangkat desa dapat memberikan pelayanan terbaiknya kepada seluruh masyarakat (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 2022).

Dalam agency theory yang dikemukakan oleh Jensen and Meckling (1976) *principal* akan melimpahkan seluruh kekuasaan dan wewenang kepada *agent* dalam pengambilan keputusan sehingga perangkat desa (*principal*) harus memiliki kompetensi yang memadai dalam menjalankan amanah yang telah diberikan oleh masyarakat (*agent*). Ketika seluruh perangkat desa mempunyai kompetensi yang tinggi dalam menjalankan pemerintahan desa, maka hal tersebut dapat

meningkatkan kepercayaan masyarakat sebab dapat meningkatkan efektivitas dari pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Hindrayani dan Wati (2021), Rasmini dan Mimba (2021) yang menunjukkan bahwa kompetensi perangkat desa berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. namun berbeda dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Sweetenia et al. 2019 yang menyebutkan jika tidak ada pengaruh antara kompetensi perangkat desa terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilaksanakan untuk studi empiris terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa studi kasus pada Kabupaten Wonosobo. Data pada penelitian ini hasil dari penyebaran kuesioner kepada 92 perangkat desa yang kemudian diolah dengan menggunakan program SPSS 25 dengan menggunakan persamaan regresi linier berganda. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas terbukti berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. dengan adanya akuntabilitas dalam setiap kegiatan pemerintahan desa melibatkan seluruh unit kerja serta mampu mempertanggungjawabkan seluruh alokasi anggaran sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya kepada masyarakat yang sebagai pemberi wewenang agar dapat mencapai efektivitas pengelolaan dana desa.
2. Partisipasi terbukti masyarakat berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Dengan adanya partisipasi masyarakat dapat menciptakan hubungan yang baik antara pemerintahan desa dengan masyarakat, karena dengan hal tersebut menjadikan perangkat desa mampu berinteraksi langsung dengan masyarakat desa. upaya yang dilakukan pemerintah desa sebagai wujud dari realisasi partisipasi masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan perencanaan program kerja yang menggunakan anggaran dana desa

3. Transparansi terbukti berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. dengan adanya transparansi pengelolaan dana desa diharapkan dapat memberikan jaminan bagi seluruh masyarakat untuk bebas mengakses informasi mengenai seluruh penyelenggaraan pemerintah agar dalam pengelolaan dana desa dapat diawasi langsung oleh masyarakat agar terwujudnya efektivitas pengelolaan dana desa.
4. Kompetensi perangkat desa terbukti berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. dengan tinggi keahlian yang dimiliki perangkat desa mampu memberikan pelayanan terbaiknya serta menambah kepercayaan masyarakat karena dapat meningkatkan efektivitas dari pengelolaan dana desa.

5.2 Keterbatasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan yang alami pada saat penelitian adalah kemungkinan terjadi perbedaan persepsi dengan pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini dikarenakan metode pengambilan data hanya dilakukan dengan penyebaran kuesioner.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti dapat memberikan untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut:

5.3.1 Bagi Akademi

Mengingat hasil *r-square* memperoleh 81,8% pada pengelolaan data, sehingga masih terdapat 18,2% variabel yang mampu mempengaruhi efektivitas

pengelolaan dana desa. untuk itu, penelitian selanjutnya diharapkan agar dapat melakukan penelitian dengan tempat penelitian yang berbeda dan menambahkan beberapa konstruksi ilmu dalam nilai-nilai islam seperti menambahkan variabel kejujuran atau juga dapat menambahkan variabel digitalisasi sebab dengan adanya perkembangan teknologi yang mampu menyajikan informasi yang lebih efektif. Kemudian penelitian selanjutnya juga diharapkan dalam melakukan penelitian menggunakan metode pengambilan data dengan wawancara langsung kepada perangkat desa agar dapat meningkatkan keseriusan dalam menjawab beberapa pernyataan ataupun pernyataan.

5.3.2 Bagi Pemerintahan Desa

Berdasarkan analisis yang telah dilaksanakan oleh peneliti, diharapkan seluruh perangkat desa hendaknya dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait siklus akuntansi terutama kepatuhan kepada standar akuntansi pemerintah (ASP) agar dapat menyajikan dan melaporkan seluruh pengelolaan dana desa yang akurat dan mampu dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriyanto. 2021. "Kebijakan Dana Desa 2021." *Kementrian Keuangan Republik Indonesia* 7. Retrieved (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Kebijakan-Dana-Desa-2021.pdf>).
- Alpendra, Emriyesi. 2020. "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi." 466–80.
- Anon. 2003. "Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil." 1–7.
- Anon. 2004. "Undang-Undang (UU) Tentang Pemerintahan Daerah." *Kaos GL Dergisi* (82):1–21.
- Anon. 2014. "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA." *Presiden Republik Indonesia* 18-April-22(1):45–54. doi: 10.1145/2904081.2904088.
- Astika, Mela Wirga, Febri Yuliani, and Seno Andri. 2022. "Implementasi Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar." 6:3599–3611.
- Bersama, Tim Pengelola Hutan. 2006. "Apa Itu Desa Mandiri ?" *Cifor* (22):1–4.
- BPK. 2006. "Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah." 1–73.
- daton, darius beda. 2022. "Mengawasi Dana Desa." *Ombudsman.Go.Id*. Retrieved (<https://www.ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--mengawasi-dana-desa#:~:text=Penyebab korupsi dana desa adalah,fisik yang tak sesuai perencanaan.>).
- Drapper. 1992. *Analisis Regresi Terapan, Edisi Kedua, Alih Bahasa Oleh Bambang Sumantri*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Eisenhardt, K. 1989. "Teori Portofolio Dan Analisis Investasi (Edisi Ke 10)." *Academy of Management Review* 14(1):57–74.
- Fatur. 2022. "ICW Catat Sektor Dana Desa Penyumbang Korupsi Tertinggi." *Dialeksis.Com*. Retrieved (<https://dialeksis.com/aceh/icw-catat-sektor-dana-desa-penyumbang-korupsi-tertinggi/>).
- Ghozali. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Edisi 9. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gibson. 1985. *Organisasi Dan Manajemen*. Empat. Jakarta: Erlangga.
- H.A.R Tilar. 2009. *Kekuasaan Pendidikan : Kajian Manjemen Pendidikan*

Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan. Jakarta: Rineka Cipta.

- Habib, Agil S. 2021. "Terkait Karier Pekerjaan, Lulusan SMA Bisa Lebih Baik Dari Sarjana?" *Kompasiana.Com*. Retrieved (<https://www.kompasiana.com/agilshabib/60062cf7d541df16903256a3/terkait-karir-pekerjaan-lulusan-sma-bisa-lebih-baik-dari-sarjana>).
- Hannon, Paul D., Patton, Dean and Marlow, Sue. 2000. "Transactional Learning Relationships: Developing Management Competencies for Effective Small Firm Stakeholder Interactions." 42. doi: doi:10.1108/00400910010373688.
- Haryanto, Sahmuddin, and Arifuddin. 2007. "Akutansi Sektor Publik." *Akuntansi Sektor Publik* 3–251.
- Hindrayani, Ni Luh Putu, and Ni Wayan Alit Erlina Wati. 2021. "PENGARUH KOMPETENSI, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Empiris Di Desa Se-Kecamatan Kintamani, Bangli)." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*.
- Hutapea, Parulian dan Nurianna Thoha. 2008. *Kompetensi Plus : Teori, Desain, Kasus Dan Penerapan Untuk HR Dan Organisasi Yang Dinamis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Indati, Aisah. 2019. "Konsep Kearifan Pada Dewasa Awal, Tengah, Dan Akhir." *Prosiding Temilnas XI IPPI* (September):26–35.
- Indra Hermawan, Ridwan, Yulita Zanaria, and Nedi Hendri. 2021. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah." *Jurnal Akuntansi Aktiva* 2(2):153–59.
- Jensen, Michael C., and William H. Meckling. 1976. "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure." *Journal of Financial Economics* 305–60.
- Kemendes PDPT. 2020. "Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No. 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021." *Peraturan Menteri, Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia* (1):1–32.
- Kisnawati, Baiq, Yuli Astini, and Riri Nigita Oktaviani. 2018. "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar." *Jurnal Valid* Vol. 15(1):1–10.
- Krina. 2003. *Indikator Dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kurniawan, Wahyu. 2022. "Korupsi Rp224 Juta, Bendahara Desa Wadasmalang Kebumen Dilaporkan Ke Polisi." *Tvonenews.Com*. Retrieved

(<https://www.tvonenews.com/daerah/jateng/28957-korupsi-rp224-juta-bendahara-desa-wadasmalang-kebumen-dilaporkan-ke-polisi>).

- Mahmudi. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Revi. Yogyakarta: UII Press.
- Mahsun, Mohammad. 2013. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Malumperas, Michael, Hendrik Manossoh, and Sonny Pangerapan. 2021. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara)." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 9(1):266–72.
- Mardiasmo. 2004a. *Efektivitas Dan Efisiensi*. Andy Jakarta.
- Mardiasmo. 2004b. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2009a. "Akuntansi Sektor Publik." P. 18 in. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009b. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Marlon Reu, Fransiskus, and Lodovicus Lasdi. 2021. "Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Tanawawo." *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 4(1):38–59. doi: 10.21632/saki.4.1.38-59.
- Martono, Nanang. 2010. "Metode Penelitian Kuantitatif." P. 57 in, edited by Rajawali Pers. Jakarta.
- Masruhin, Anam, and M. Elfan Kaukab. 2019. "Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo)." *Journal of Economic, Business and Engineering* 1(1):118–30.
- Moeheriono. 2018. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Muamarizal, Said, Samsir, and Marzolina. 2015. "Pengaruh Pengalaman Kerja Dan Penilaian Prestasi Kerja Terhadap Pengembangan Karir Karyawan Pada Pt. Jasaraharja Putera Cabang Pekanbaru." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau* 2(1):1–21.
- Nazar, Shinta Ningtiyas, Rosita Wulandari, Syafrizal Syafrizal, and Ayu Lestari. 2021. "Competencies on Execution of Village Government Authorities, Transparency, Public Participation and Accountability of Villages Fund Management." *EAJ (Economic and Accounting Journal)* 4(1):59. doi: 10.32493/eaj.v4i1.y2021.p59-70.
- Nurkhasanah. 2019. "Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Dan

Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang).” 53(9):1689–99.

- Nurmillah, Aminah. 2022. “Peran Penting Kompetensi ASN Dalam Pelayanan Publik.” *Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*. Retrieved (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14954/Peran-Penting-Kompetensi-ASN-dalam-Pelayanan-Publik.html>).
- PDTT, Permendes. 2020. “Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggu.” *Sereal Untuk* 51(1):51.
- Priyatno, Duwi. 2013. *Analisis Korelasi, Regresi Dan Multivariate Dengan SPSS*. Yogyakarta: Gava Media.
- Putra, I. Made Yoga Darma, and Ni Ketut Rasmini. 2019. “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa.” *E-Jurnal Akuntansi* 28:132. doi: 10.24843/eja.2019.v28.i01.p06.
- Putri, Aulia Rakhma Larasati. 2021. “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dan Kompetensi Aparat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa.” *Universitas Stikubank* 5(1):557–83.
- Ramadhani, Nada Salsabila, and Anik Yuliaty. 2021. “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa.” *Jurnal Proaksi* 8(2):561–71. doi: 10.32534/jpk.v8i2.2331.
- Rasmini, Ni Ketut, and Putu Sri Harta Mimba. 2021. “The Influence of Apparatus Competence, Leadership Style, Tri Hita Karana Culture and Society Participation on the Effectiveness of Village Fund Management.” *The Indonesian Accounting Review* 11(1):61. doi: 10.14414/tiar.v11i1.2046.
- Roe, Robert A. 2001. “Trust Implications for Performance and Effectiveness.” *European Journal* 12:5.
- Santiso, Carlos. 2001. “Good Governance and Aid Effectiveness : The World Bank and Conditionality Good Governance and Aid Effectiveness : The World Bank and Conditionality Paul H Nitze School of Advanced International Studies.” *The Georgetown Public Policy Review* 7(1):1–22.
- Santoso, Eko. 2011. “Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Ngawi.” *Tesis* 1–75.
- Sjafrina, Almas. 2021. “Cegah Korupsi Dana Desa.” *Indonesian Corruption Watch*.
- Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Rev. ed. Malang: Malang Setara Press.
- Sudjatmiko, Tomi. 2017. “‘Tilep’ Dana Desa, Kades Karangrejo Ditangkap Polisi.” *Krjogja, Com*. Retrieved (<https://www.krjogja.com/berita->

- lokal/jateng/keu/tilep-dana-desa-kades-karangrejo-ditangkap-polisi/).
- Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. 2018. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryadi. 2005. "Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom Dan Pemberdayaan Masyarakat." P. 46 in. Jakarta: CV Citra Utama.
- Supriyanto, Eko. 2022. "Peran Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional." *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. Retrieved ([https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3854-peran-dana-desa-dalam-pemulihan-ekonomi-nasional-dan-penanganan-covid-19.html#:~:text=Dana Desa merupakan dana yang,pembinaan kemasyarakatan%2C dan pemberdayaan masyarakat.](https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3854-peran-dana-desa-dalam-pemulihan-ekonomi-nasional-dan-penanganan-covid-19.html#:~:text=Dana%20Desa%20merupakan%20dana%20yang,pembinaan%20kemasyarakatan%20dan%20pemberdayaan%20masyarakat.)).
- Sutedi. 2011. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suwarto, Sukarno W. 2021. "Akuntabilitas Dana Desa." *Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan*. Retrieved (<https://www.bpkp.go.id/jateng/konten/3544/AKUNTABILITAS-DANA-DESA>).
- Sweetenia, Amanda Mutiara, Eka Pinditya Ayu Caesari, Arum Frida Aprillia, and Anissa Hakim Purwantini. 2019. "Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa." *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi* 17(1):44-56. doi: 10.31603/bisnisekonomi.v17i1.2752.
- Tim, Jpnn. 2015. "JPNN.Com Daerah Jateng Jadi Tersangka, Pergi Entah Ke Mana Jadi Tersangka, Pergi Entah Ke Mana." *JPnn.Com*. Retrieved (<https://www.jpnn.com/news/jadi-tersangka-pergi-entah-ke-mana>).
- Tvone, Tim. 2021a. "Korupsi 200 Juta Dana Bantuan Desa, Kades Di Wonosobo Dicidaduk Polisi." *Tv One News*. Retrieved ([.com/berita/11959-korupsi-200-juta-dana-bantuan-desa-kades-di-wonosobo-dicidaduk-polisi](https://www.tvonenews.com/berita/11959-korupsi-200-juta-dana-bantuan-desa-kades-di-wonosobo-dicidaduk-polisi)).
- Tvone, Tim. 2021b. "Korupsi 200 Juta Dana Bantuan Desa, Kades Di Wonosobo Dicidaduk Polisi." *Tvonenews.Com*. Retrieved (<https://www.tvonenews.com/berita/11959-korupsi-200-juta-dana-bantuan-desa-kades-di-wonosobo-dicidaduk-polisi>).
- Wafirotin, Khusnatul Zulfa, and Umi Septivastuti. 2019. "The Effect of Transparency, Community Participation, and Accountability on Management of Village Funds in Ponorogo Regency." *Ekulibrium : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi* 14(1):31. doi: 10.24269/ekulibrium.v14i1.1527.

- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, Dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Wonosobozone. 2022. "2023, Pemkab Wonosobo Masih Fokus Tingkatkan SDM, Infrastruktur Dan Ekonomi." Retrieved (<https://wonosobozone.com/2022/03/29/2023-pemkab-wonosobo-masih-fokus-tingkatkan-sdm-infrastruktur-dan-ekonomi/>).
- Yanto, Edi, and Aqfir Aqfir. 2021. "Pengaruh Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa." *Economy Deposit Journal (E-DJ)* 2(2). doi: 10.36090/e-dj.v2i2.916.

